

RENSTRA

2024-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



RENSTRA

TAHUN 2024-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Renstra ini diharapkan menjadi pedoman Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya serta salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Makassar,
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROV. SULSEL,

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 4

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 9

 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
 Provinsi Sulawesi Selatan 9

 2.1.1. Struktur Organisasi 9

 2.1.2. Tugas dan Fungsi 12

 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 25

 2.2.1 Sumber Daya Manusia 25

 2.2.2 Sarana dan Prasarana 29

 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
 Selatan 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI 60

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 93

 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 93

 4.1.1. Tujuan dan Sasaran 93

 4.1.2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Untuk Kewenangan
 daerah 100



4.2. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....106

5.1. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....106

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF118

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN145

BAB VIII P E N U T U P171



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dan Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	26
Tabel 2.3	Jumlah Jabatan Struktural Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	26
Tabel 2.4	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	27
Tabel 2.5	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Usia	28
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan	29
Tabel 2.7	Daftar Inventaris Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	30
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel 2. 9	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	40
Tabel 2. 10	(T-C.24) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	48
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	69
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L Dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	82
Tabel 3.4	Identifikasi Isu- Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	89
Tabel 4. 1	T-C 25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	95
Tabel 5. 1	Analisis S.W.O.T.	109
Tabel 5. 2	Strategi Dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026	114



Tabel 6.1	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	120
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	146
Tabel 7.2	(T-C.28) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran	151
Tabel 7. 3	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Tujuan Dan Sasaran	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	3
Gambar 1. 2	Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 1.3	Keterkaitan Dokumen Perencanaan RPD dan Renstra Sekretariat Daerah.....	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	11
Gambar 3.1	Pohon Masalah	61
Gambar 4.1	Cascading Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik, daya saing ekonomi, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat yang menjadi isu dan tantangan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Meskipun pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terbukti mampu berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, namun jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu upaya perwujudan pembangunan daerah menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis aktual. Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan



persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD.

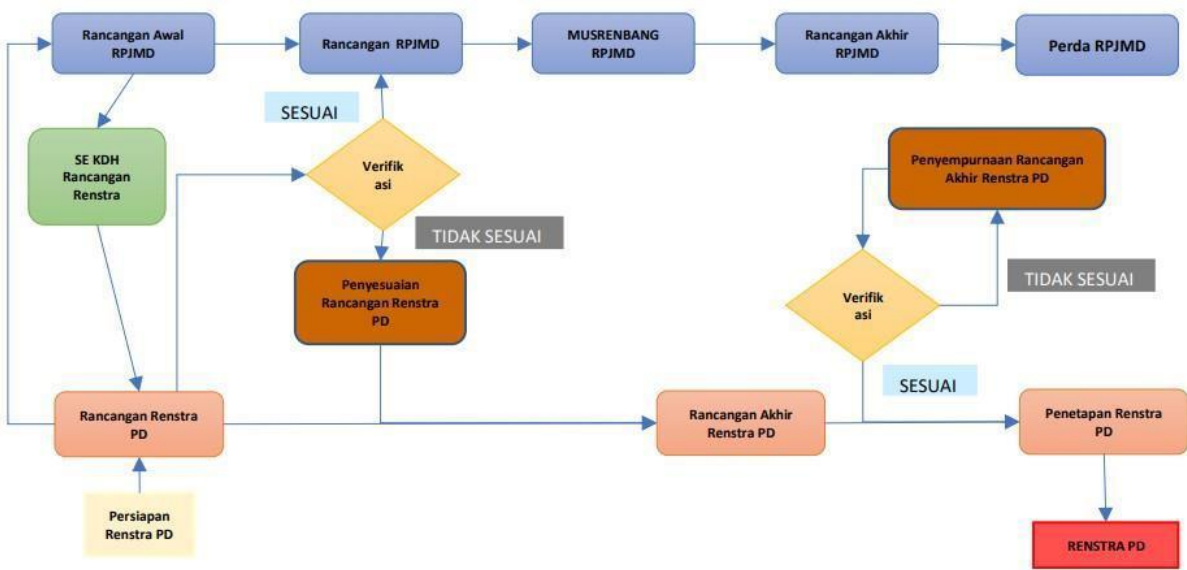
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Daerah Otonom Baru. Upaya perwujudan arah kebijakan pembangunan daerah menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Provinsi Sulawesi Selatan mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas



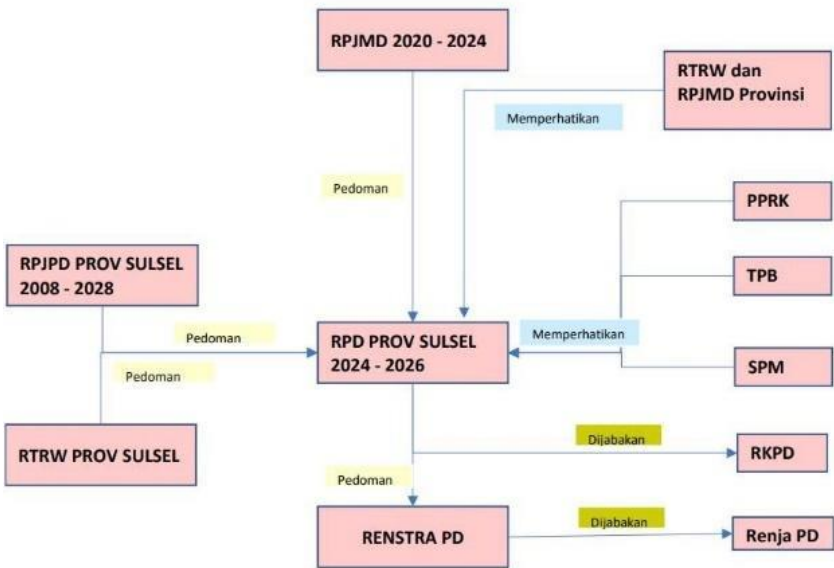
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Renstra disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan. Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);



15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi perangkat daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah kebijakan dan Pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran tahun 2024 – 2026.
2. Sebagai dasar penilaian kinerja baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 Sebagai acuan penyusunan Dokumen perencanaan tahunan lainnya.
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
4. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (OPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran

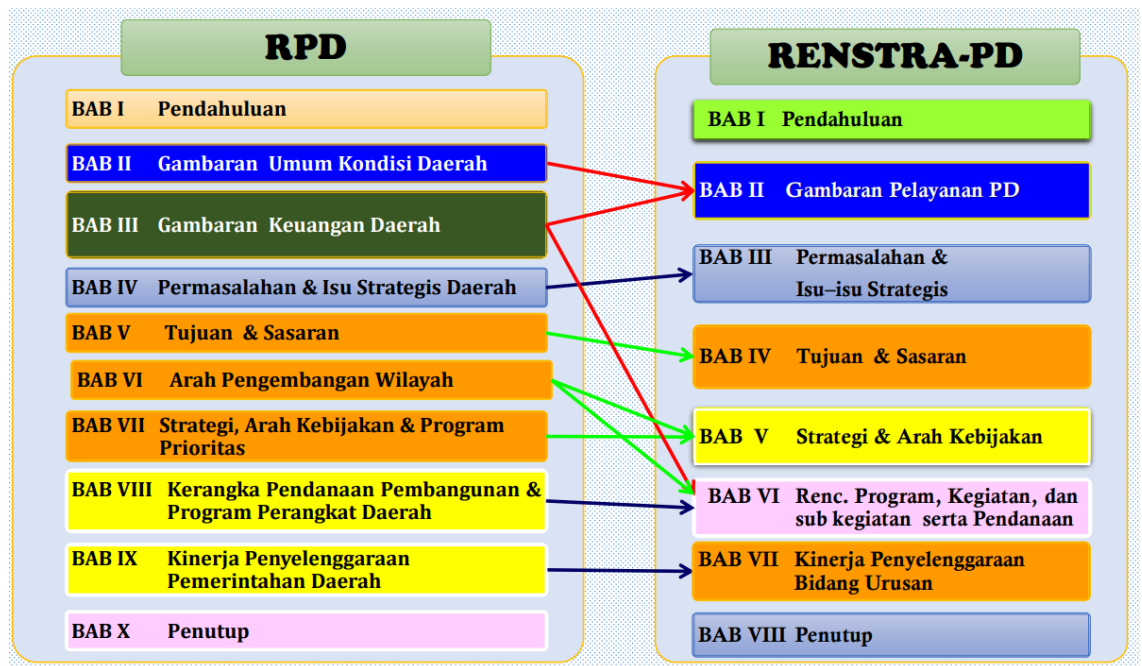


- dan kebijakan pembangunan daerah;
6. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Setiap Tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun untuk menjabarkan RPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun keterkaitan RPD dan Renstra Sekretariat Daerah yaitu:

Gambar 1.3 Keterkaitan dokumen perencanaan RPD dan Renstra Sekretariat Daerah



Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaah terhadap Visi, Misi dan Program, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Sekretaris Daerah (Sekda);
- 2) Unsur Pembantu :
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Biro Hukum.
 - b) Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 - 2) Biro Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - 1) Biro Organisasi; dan
 - 2) Biro Umum;
- 3) Staf Ahli:
 - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional



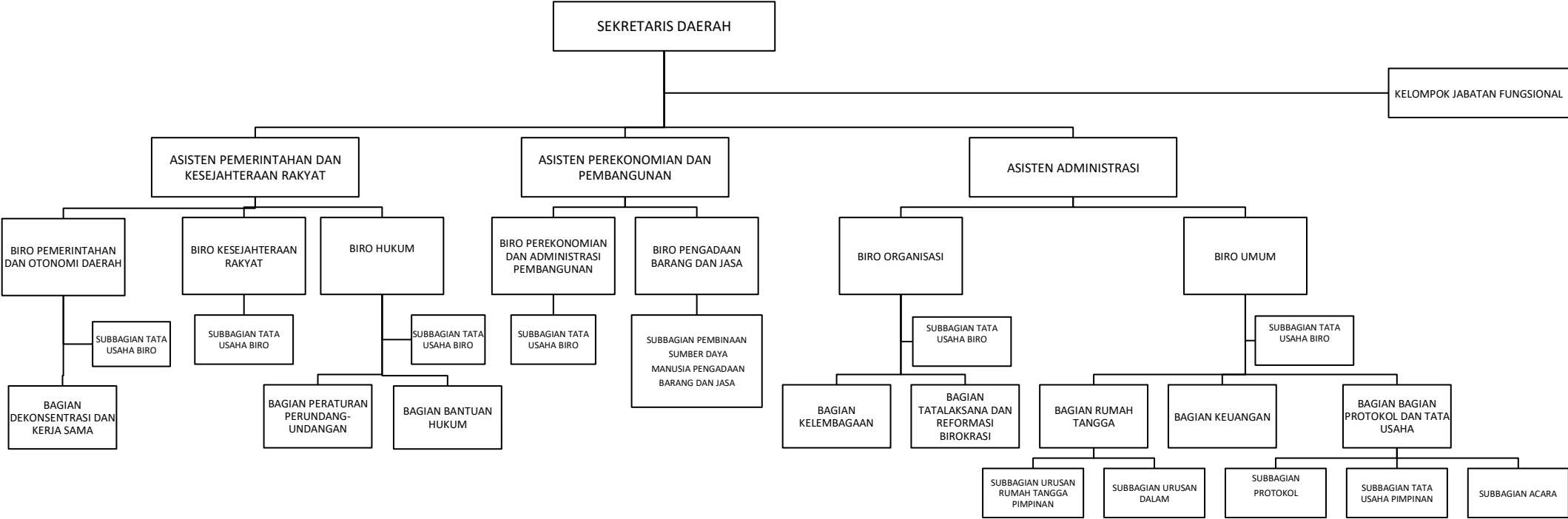
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

- B. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- C. Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- D. Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- E. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekda.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



2.1.2 Tugas dan Fungsi

Adapun rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsinya.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, serta pelayanan administratif sesuai dengan pembidangan tugas. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang



- kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Biro Hukum.

a. Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerja sama. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerja sama;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerja sama
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka



penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan

e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Pemerintahan terdiri atas:

1) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerja sama, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

2) Subbagian Tata Usaha Biro

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

b. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas, membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Pemerintahan melaksanakan fungsi:



- a) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha Biro

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat.

c. Biro Hukum

Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. Kepala Biro Hukum menjalankan fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;



- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro hukum terdiri atas:

1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang produk hukum daerah kabupaten/kota, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas

2) Bagian Bantuan Hukum

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang litigasi, dan non litigasi dan hak asasi manusia, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.

3) Subbagian Tata Usaha Biro

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan



administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Hukum.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah, penyusunan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa, serta pelayanan administratif sesuai dengan pembidangan tugas. Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjalankan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- b. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa.



a. **Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan Kebijakan Daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- b) Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- c) Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- d) Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha Biro



Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

b. Biro Pengadaan Barang/Jasa

Biro Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan



e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari:

1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas.

2) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia

Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah terkait pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, dan melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa.

3. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang organisasi dan umum serta pelayanan administratif sesuai dengan pembedanaan tugas. Asisten Administrasi menjalankan fungsi:

- a. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- b. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang umum dan administrasi pimpinan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

- organisasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan organisasi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
 - g. pengoordinasian dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Administrasi membawahi:

- 1. Biro Organisasi; dan
- 2. Biro Umum

a. Biro Organisasi

Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- b) penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- c) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- d) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan



Daerah di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;

- e) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan
- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Organisasi terdiri atas:

1) Bagian Kelembagaan

Bagian Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota, dan analisis jabatan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

2) Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

3) Subbagian Tata Usaha Biro

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha Biro, dalam mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan



pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Organisasi.

b. Biro Umum

Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha dan protokol, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Umum menjalankan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum;
- b) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha, dan protokol, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum;
- c) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Umum terdiri atas:

1) Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga pimpinan dan urusan dalam, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Urusan Rumah Tangga Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Rumah Tangga dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Subbagian Urusan Dalam dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Rumah



Tangga dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang urusan dalam.

2) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, dan pengelolaan kendaraan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

3) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, protokol, dan kepegawaian Sekretariat Daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protokol dan tamu
- Subbagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan.
- Subbagian Acara dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Daerah dan pelayanan bidang acara.



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kondisi sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung lainnya yang dimiliki. Kondisi sumber daya manusia sebagai pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sumber Daya Manusia adalah sumber daya aparatur yang secara kuantitas dan kualitas dapat berfungsi optimal mendukung organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan data bulan Juni Tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur (pegawai) sebanyak **463 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga)** orang yang terdiri dari **247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh)** orang laki-laki dan **216 (Dua Ratus Enam Belas)** orang perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN											
		Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)/ Subkoordinator		Fungsional Pelaksana (Staf)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf Ahli	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Biro Pemerintahan Daerah	-	1	-	-	1	-	1	-	4	8	14	17
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	-	-	1	-	7	5	9	21
6	Biro Hukum	-	1	-	-	1	1	1	-	11	11	8	9
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	10	15
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	1	-	-	1	-	1	-	35	10	18	15
9	Biro Organisasi	-	-	-	-	2	-	1	-	7	8	7	14
10	Biro Umum	-	1	-	-	1	2	4	2	7	18	79	49
TOTAL		1	13	1	4	5	7	5	77	65	145	140	

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, SDM yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam. Jumlah SDM Sekretariat Daerah per Juni 2023 sebanyak 463 orang, jumlah Laki-laki 247 orang atau 53,34%, dan Perempuan sebanyak 216 orang atau sebesar 46,66%



yang kompetensinya untuk Eselon I dijabat oleh Sekretaris Daerah, Eselon II diduduki oleh 3 (tiga) orang Asisten, 6 (enam) Staf Ahli dan 5 (lima) orang Kepala Biro, Eselon III diduduki oleh 9 (sembilan) orang Kepala Bagian, dan Eselon IV diduduki oleh 12 (dua belas) orang Kepala Sub Bagian.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN					
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)/ Subkoordinator	Fungsional Pelaksana (Staf)
1	Sekretaris Daerah	1					
2	Asisten		3				
3	Staf Ahli		6				
4	Biro Pemerintahan Daerah		1	1	1	12	31
5	Biro Kesejahteraan Rakyat		1	-	1	12	30
6	Biro Hukum		1	2	1	22	17
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		-	-	1	11	25
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa		1	1	1	45	33
9	Biro Organisasi			2	1	15	21
10	Biro Umum		1	3	6	25	128
TOTAL		1	14	9	12	142	285

Sedangkan jumlah Sumber Daya Aparatur berdasarkan pangkat/golongan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Jabatan Struktural Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah				1	1
2	Asisten				3	3
3	Staf Ahli				6	6
4	Biro Pemerintahan Daerah	1	3	29	13	46
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	3	33	7	44
6	Biro Hukum		1	38	4	43
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		5	25	7	37
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1	1	64	15	81
9	Biro Organisasi		2	23	14	39
10	Biro Umum	3	44	105	11	163
TOTAL		6	59	317	81	463



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 507 orang ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 263 orang (52%) adalah laki-laki dan 244 orang (48%) adalah perempuan. selain itu dari tabel diatas juga tergambar jumlah PNS Golongan I sebanyak 7 orang (1,38%), Golongan II sebanyak 70 orang (13,81%), Golongan III sebanyak 334 orang (65,88%), dan Golongan IV sebanyak 96 orang (18,93%). Dari data tersebut tergambar bahwa ASN Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan didominasi oleh Golongan III namun jika dibandingkan dengan jumlah eselon dan golongan terdapat biro pejabat eselon IV diduduki oleh pangkat golongan III dan ada juga golongan IV menduduki jabatan staf.

Selanjutnya total jumlah PNS per biro terlihat bervariasi, Jumlah ASN terbesar pada Biro Umum sebesar 140 Orang dan terkecil pada biro Hukum sebesar 38 orang dari data ini tercermin penempatan ASN pada sekretariat daerah belum berdasar beban kerja. Penggolongan Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan secara keseluruhan pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Sekretaris Daerah		1					
2	Asisten	3	1					
3	Staf Ahli	2	3	1				
4	Biro Pemerintahan Daerah	-	18	25	1	1	1	
5	Biro Kesejahteraan Rakyat		12	28	1	2	1	
6	Biro Hukum		15	26	1	1		
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1	10	18	1	7		
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa		20	53	2	5		
9	Biro Organisasi	1	15	19	2	2		
10	Biro Umum		20	91	4	44	4	
TOTAL		7	115	261	12	62	6	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat



pendidikan sarjana (S1) dan magister sarjana (S2) yaitu sejumlah 376 orang atau sebesar 81,21 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.5 Jumlah Aparatur berdasarkan golongan usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)			
		20-35	36-40	41-50	>50
1	Sekretaris Daerah				1
2	Asisten				3
3	Staf Ahli			2	4
4	Biro Pemerintahan Daerah	10	6	16	14
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	5	24	13
6	Biro Hukum	14	7	17	5
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	6	17	12
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6	11	43	21
9	Biro Organisasi	6	10	10	13
10	Biro Umum	29	20	70	44
TOTAL		69	65	199	130

Berdasarkan data statistik pegawai tersebut nampak bahwa 28,08% pegawai akan memasuki masa pensiun dalam kurun waktu 1 - 8 tahun mendatang dan akan mengalami loss generation apabila selama kurun itu tidak ada penambahan pegawai baru. Tentu saja penyelesaian tugas menjadi tidak maksimal apabila tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai. Selain itu peran penataan personil juga menjadi vital untuk bisa mempersiapkan kader dan mengisi jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi pemerintahan.



Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN										
		Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)		Fungsional Pelaksana (Staf)
		L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris Daerah	1										
2	Asisten		3									
3	Staf Ahli		5	1								
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1			1		1	4	8	14	17
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	-	-	1	7	5	9	21
6	Biro Hukum		1		1	1	1		11	11	8	9
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			-	-	-	-	1	6	5	10	15
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	1	-	1	-	1	-	35	10	18	15
9	Biro Organisasi				2		1		7	8	7	14
10	Biro Umum		1	0	1	2	4	2	7	18	79	49
TOTAL		1	13	1	4	5	7	5	77	65	145	140

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.7 Daftar Inventaris Aset tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
I.	Kendaraan											
1	Mobil	7	6	4	2	4	5	94	122	99	11	12
2	Motor	8	9	4	4	13	3	135	176	108	10	58
3	Bus/Mini Bus	0	0	0	0	0	0	92	92	52	0	40
4	Kendaraan Lainnya	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	3
II.	Bangunan											
1	Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	39	39	39	0	0
2	Gedung Lainnya	0	0	0	0	0	0	60	60	60	0	0
3	Gedung Rapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gudang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Musholla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Peralatan dan Mesin											



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
1	Mesin ketik Manual	0	0	3	2	1	7	19	32	19	0	13
2	PC Unit	20	24	28	7	44	25	141	289	216	28	45
3	PC Lainnya	0	1	0	9	2	2	9	23	13	9	1
4	Printer	19	47	46	11	56	38	201	418	320	30	76
5	Mesin Fotocopy	1	1	1	0	3	0	19	25	22	2	1
6	Laptop/notebook	22	34	24	9	55	30	5	179	103	21	41
7	Scanner	0	3	2	0	1	2	13	21	17	1	1
8	UPS	0	0	10	4	7	14	19	54	33	0	16
9	AC	0	55	14	11	7	15	70	172	116	18	38
10	AC Split	20	0	2	0	10	0	338	370	366	0	2
11	Televisi	6	13	6	6	6	1	199	237	201	6	24
12	Kipas Angin	0	0	0	0	0	0	37	37	34	0	3
13	Pesawat Telepon	4	0	1	2	0	1	5	13	3	3	7
14	Pesawat Faximile	1	0	2	2	1	1	11	18	7	2	9
15	Meja Komputer	0	0	0	1	6	0	0	7	5	2	0



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
16	Lemari Besi	8	0	2	3	6	2	21	42	28	14	0
17	Lemari Kayu	4	0	24	3	8	4	175	218	182	15	21
18	Brankas	6	0	1	1	0	0	6	14	6	7	1
19	Rak Kayu	5	0	0	0	2	0	18	25	18	1	1
20	Rak Kaca	0	0	0	0	2	0	2	4	4	0	0
21	Filling Besi	4	0	6	8	8	2	9	37	19	17	1
22	Lemari	2	0	2	11	0	0	47	62	47	15	0
23	Kursi Pejabat	16	0	4	2	12	26	55	115	94	19	2
24	Meja Pejabat	13	0	4	1	15	16	40	89	69	19	1
25	Kursi Kerja	62	0	11	40	41	37	369	560	439	113	8
26	Meja Kerja	62	0	42	40	39	25	265	473	352	102	19
27	Kursi Tamu	5	0	1	12	1	1	117	137	120	17	0
28	Kursi Rapat	48	0	40	98	49	40	2853	3128	2593	514	21
29	Meja Rapat	3	0	0	4	1	2	119	129	122	7	0
30	White Board	1	0	1	3	1	3	6	15	9	5	1



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
31	Sofa	1	0	4	1	4	1	118	129	123	15	0
32	Gorden	8	0	2	2	1	0	0	13	1	12	0
33	Vacuum Cleaner	0	0	0	0	1	0	61	62	57	4	1
34	Kulkas	2	0	2	1	4	2	83	94	84	8	2
35	Dispenser	6	0	3	0	3	1	147	160	136	8	6
36	Kamera	3	0	4	4	3	2	7	23	12	4	3
37	Handycam	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
38	Proyektor	2	0	4	2	0	4	18	30	20	3	5
39	Layar Proyektor	2	0	0	1	0	0	21	24	19	4	0
40	Handy Talky	0	0	0	0	0	0	154	154	134	10	10
41	CCTV	1	0	0	0	3	0	86	90	92	0	0
42	Mesin Hitung	2	0	0	1	1	0	20	24	17	4	3
43	Penghancur Kertas	1	0	0	0	0	0	13	14	14	0	0
44	Mesin Absen	1	2	1	2	2	2	19	29	26	3	0
45	Sound System	1	4	0	0	0	0	92	97	92	2	2



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
46	Wireless	0	0	0	0	0	0	33	33	30	3	0
47	Mixer	0	0	0	0	0	0	8	8	4	0	4
48	Exhaust Fan	2	0	0	0	0	0	24	26	19	6	1
49	Kaca Hias	2	0	0	0	0	0	8	10	8	2	0
50	Gambar Presiden	1	0	0	1	0	0	2	4	3	1	0
51	Digitizer	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
52	Monitor	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
53	Lift/elevator	0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	2
54	Tempat Tidur / Spring Bed	0	0	0	0	0	0	147	147	143	3	1
55	Alat dapur Lainnya	0	0	0	0	0	0	3870	3870	3966	1	3
56	Alat Rumah Tangga Lainnya	0	0	0	0	0	0	931	931	931	0	0
57	Lain-lain	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0
58	Global Positioning System (GPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Laser Disc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Hardisk	0	0	0	2	0	0	17	19	17	0	0



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan							Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum		Baik	Sedang	Rusak
61	Mainframe	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
62	External	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
63	Server	0	0	1	0	9	0	2	12	11	0	1
64	Modem / Peralatan Jaringan Lain	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
65	Tele Recorder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kursi Tunggu	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0
67	Lemari Arsip	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0



Inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi masing-masing instansi, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Barang inventaris tersebut masih perlu penyesuaian dengan jumlah pengguna, sehingga tidak terjadi jumlah barang lebih dari jumlah penggunanya, dan masih perlunya memperhatikan analisa kebutuhan barang, serta masih perlunya menginventarisasi barang berdasarkan kondisi akhir, sehingga kondisi akhir barang tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi atau perlu dilakukan pemeliharaan barang yang ada. Pola distribusi barang ke pengguna, masih perlu difokuskan pada kondisi beban kerja yang lebih tinggi, sehingga barang inventaris yang ada, berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 - 2026 yang diukur menggunakan beberapa indikator di antaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau indikator kinerja lainnya. Adapun capaian kinerja pada lingkup sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.8 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN : Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama sekretariat daerah 1.1. SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	1 Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	Sangat tinggi	Sangat Tinggi	Belum Rilis
		2 Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis
		3 Persentase Usulan Penyelesaian Batas Wilayah Kab/Kota yang difasilitasi	8,30%	11,70%	21,70%	28,30%	30%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis
		4 Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis
		5. Skor Reformasi Birokrasi Pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,40	2,40	3,00	4,00	5,00	2,40	2,40	3,00	4,00	Belum Rilis
		6. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	1.2. SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	7.	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis	
		8.	Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis	
		9.	Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Belum Rilis
	1.3. SASARAN: Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	10.	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Provinsi SulSel	64,28 (B)	70,00 (BB)	76,00 (BB)	80,00 (A)	85,00 (A)	71,33 (BB)	71,33 (BB)	85,00 (A)	76,93 (BB)	Belum Rilis
		11.	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi	61,24 (B)	70,00 (B)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (A)	73,25 (B)	73,25 (B)	80,00 (A)	78,58 (BB)	Belum Rilis
		12.	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi terkait penataan kelembagaan dan analisis jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	Belum Rilis
		13.	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dibina berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	Belum Rilis
		14.	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi tatalaksana pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	Belum Rilis
		16.	Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	77 (Puas)	77 (Puas)	90 (Sangat Puas)	86,06 (sangat puas)	Belum Rilis



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		17	Indeks pelayanan Keuangan lingkup Sekretariat Daerah yang tepat waktu	70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	76 (Puas)	76 (Puas)	90 (Sangat Puas)	85,6 (sangat puas)	Belum Rilis
		18	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	75 (Puas)	80 (Puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	86,74 (Puas)	86,74 (Puas)	95 (Sangat Puas)	91,4 (Sangat Puas)	Belum Rilis
		19	Persentase layanan (materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan yang di tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis
	1.4. SASARAN Akuntabilitas Perangkat Daerah	20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55 (CC)	61 (B)	71 (BB)	81 (A)	91 (AA)	75,10 (BB)	75,10 (BB)	79,34 (BB)	80,25 (A)	Belum Rilis
		21	% capaian kinerja Program Perangkat Daerah	95%	96%	97%	98%	99%	96%	96%	98%	100%	Belum Rilis
		22	% Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material)	0,03 (99,97%)	0,02 (99,98%)	0,01 (99,99%)	0,01 (99,99%)	0,00 (100%)	100%	100%	100%	100%	Belum Rilis
2.	TUJUAN : Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter 2.1. SASARAN Meningkatnya Bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	23	Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	Belum Rilis



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tabel 2. 9 (T-C.23) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BIRO PEMERINTAHAN																				
1	Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia				Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Usulan Penyelesaian Batas Wilayah Kab/Kota yang difasilitasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
BIRO HUKUM DAN HAM																				
1	Jumlah pengkajian produk hukum Daerah dengan target yang direncanakan (Pergub, Keppub, Instruksi Gub dan Perjanjian kerjasama)			1358	1358	1358	1358	1358	1358	2372	1952	-	-	-	174%	143%	-	-	-	
2	Persentase kegiatan sosialisasi / bimtek terkait pembentukan produk hukum daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
3	Persentase kegiatan pembinaan PPNS dari target yang direncanakan			100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	0	Sejak tahun 2017 Kewenangan koordinasi PPNS Beralih ke Kantor Satpol PP
4	Jumlah SKPD Pemprov / Kab / Kota yang telah difasilitasi dalam pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
5	Jumlah Produk Hukum yang tersedia (buku Perda, Pergub) dari target yang direncanakan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
6	Persentase orang / SKPD yang diberi pelayanan terkait penyebarluasan produk hukum	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Jumlah perkara pemda yang ditangani dari keseluruhan perkara yang diterima	20	20		20	20	20	20	20	45	36	22	35	22	225%	180%	110%	175%	110%	
8	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dari permohonan yang masuk	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat fungsional yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan produk hukum Daerah Kab/Kota	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang diasistensi / dievaluasi /diklarifikasi (Ranperda, Perda) dari permohonan yang masuk	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																				
1	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
2	Persentase Pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
3	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
4	Jumlah SKPD yang menggunakan server yang terkoneksi melalui data center (subdomain)			20 OPD	30 OPD	35 OPD	45 OPD	-	-	30 OPD	35 OPD	-	-	-	30 OPD	35 OPD	-	-	-	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Cakupan kerja sama informasi aktif dengan media massa			41 Media Massa	49 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	-	-	-	51 Media Massa	51 Media Massa	-	-	-	
6	Persentase kepuasan pelayanan kedinasan kepala daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
BIRO PEREKONOMIAN																				
1	Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	98	98	99,09	98,62	98	98	98	99,09	98,62	98	
2	Persentase optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				100%	100%	100%	100%	100%	99	100	98,76	99,82	99	99	100	99	99,82	99	
3	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	98	97	97,65	98	98	98	97	97,54	98	98,43	
4	Tercapainya pengembangan Perekonomian Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	96	92	85,5	96,46	96,89	96	92	85,5	96,46	96,90	
5	Tersedianya Informasi Pembinaan Kelembagaan Ekonomi				100%	100%	100%	100%	100%	97	98	99,17	99,71	97	97	98	99,17	99,71	97	
6	Terlaksananya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi				100%	100%	100%	100%	100%	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
7	Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai				100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan system evaluasi				-	-	-	100%	100%	-	-	99,31	98,96	-	-	-	99,31	98,96	-	
BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG / JASA																				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran dan kapasitas kinerja OPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,95	94,47	98,69	-	-	97,95	94,47	98,69	-	-	
3	Jumlah laporan / dokumen pembinaan jasa usaha pembangunan lingkup prov Sulawesi Selatan			100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	97,95	92,66	98,97	-	-	97,95	92,66	98,97	-	-	
4	Cakupan pelaku usaha jasa pembangunan yang bersertifikasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,95	92,66	98,97	-	-	97,95	92,66	98,97	-	-	
5	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan Administrasi pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,68	92,52	97,52	-	-	89,68	92,52	97,52	-	-	
6	Jumlah laporan / dokumen informasi pembangunan Prov. Sulawesi Selatan			100%	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	89,68	92,52	97,52	-	-	89,68	92,52	97,52	-	-	
7	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD			-	-	-	-	100% (2 Dok)	100% (2 Dok)	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
8	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	83,03	95,57	-	-	-	83,03	95,57	
9	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
10	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	
11	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	
12	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik			-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
BIRO KESEJAHTERAAN																				
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
2	Cakupan Aparatur OPD yang mengikuti pelatihan / sosialisasi / Bimtek				-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Persentase Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen keuangan				-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
4	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana				-	-	100	80	80	-	-	100	80	80	-	100	100	100	100	
5	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang kerawanan sosial				-	652	360	375	375	-	652	360	375	375	-	100	100	100	100	
6	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang perlindungan social				-	1050	520	355	355	-	1050	520	355	355	-	100	100	100	100	
7	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan				-	1234	2460	1062	1062	-	1234	2460	1062	1062	-	100	100	100	100	
8	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan fungsi dan peran Lembaga keagamaan dan tokoh agama				-	595	503	580	580	-	595	503	580	580	-	100	100	100	100	
9	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pelayanan ibadah haji				-	-	190	305	305	-	-	190	305	305	-	100	100	100	100	
10	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang kepemudaan dan olahraga				-	240	160	186	186	-	240	160	186	186	-	100	100	100	100	
11	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang Pendidikan dan seni budaya				-	180	300	240	240	-	180	300	240	240	-	100	100	100	100	
12	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan dan keberagaman kekayaan dan nilai budaya				-	220	100	180	180	-	220	100	180	180	-	100	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan penanggulangan NAPZA dan HIV-AIDS				-	350	450	175	175	-	350	450	175	175	-	100	100	100	100	
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA																				
1	Persentase pelayanan Ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan dan sistem penyusunan perencanaan dan cakupan sarana dan prasarana yang tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	93,93	99,45	99,45	93,93	93,93	93,93	99,45	99,45	99,45	99,45	
2	Persentase pelayanan Administrasi diklat PNS, pembekalan kewirausahaan PNS, pra purna bhakti serta Administrasi praktek siswa dan mahasiswa dan pengelolaan Administrasi CPNS, PNS, Mutasi dan pensiun PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan				100%	100%	100%	100%	100%	90,43	98,37	-	-	-	90,43	98,37	98,37	100	100	
3	Persentase Fasilitas pembinaan dan pengembangan akuntabilitas kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	94,37	91,57	91,57	100	100	94,37	91,57	91,57	100	100	
4	Persentase fasilitas penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi				100%	100%	100%	100%	100%	90,44	96,31	96,31	96,31	96,31	90,44	96,31	96,31	96,31	96,31	
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN																				
1	Persentase pelayanan aparatur dan Administrasi aparat structural / fungsional			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,3	99,19	98,06	99,27	99,27	99,3	99,19	98,06	99,27	99,27	
2	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas pengadaan / pemeliharaan sarana / prasarana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15	98,56	99,13	97,57	97,57	98,15	98,56	99,13	97,57	97,57	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Jumlah dokumen perencanaan, pengelolaan / pengendalian / pengujian keuangan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			100%	235 Dok	240 Dok	240 Dok	240 Dok	240 Dok	96,21	99,55	99,72	99,86	99,86	96,21	99,55	99,72	99,86	99,86	
4	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,58	99,44	99,77	91,16	91,16	88,58	99,44	99,77	91,16	91,16	
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH																				
1	Akurasi Data Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			5 Laporan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	-	-	-	100	100	-	-	-	
2	Jumlah Persil/Bidang Aset Tanah yang disertifikatkan			18 Sertifikat	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	-	-	-	100	100	-	-	-	
3	Jumlah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipagar			5 Tanah	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	100	100	-	-	-	
4	Jumlah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terselesaikan masalahnya			5 Tanah / Bangunan	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	-	-	-	100	100	-	-	-	
5	Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dihapus			5 Dokumen	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1241 Barang Inventaris	891 Barang Inventaris	-	-	-	100	85	-	-	-	
6	Jumlah rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang yang direncanakan pada SKPD			10 Perencanaan	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	-	-	-	100	100	-	-	-	
7	Jumlah Barang yang ditetapkan standar harganya dalam rangka rencana dan belanja barang milik daerah			10 Perencanaan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	-	-	-	100	100	-	-	-	
8	Jumlah SK pemanfaatan Barang Milik Daerah			5 Laporan	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	66 SK Gubernur	35 SK Gubernur	-	-	-	100	100	-	-	-	
9	Jumlah Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan status penggunaannya			5 Laporan	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	55 SK Gubernur	33 SK Gubernur	-	-	-	100	300	-	-	-	
10	Jumlah belanja barang inventaris tertata dan akurat			5 Laporan	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	-	-	-	100	100	-	-	-	
11	Jumlah Layanan Sistem Informasi Manajemen Aset yang digunakan SKPD			1 Aplikasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	-	100	100	-	-	-	



Untuk mencapai target ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program pembangunan yang dijabarkan melalui kegiatan terkait dalam mendukung pelayanan kesekretariatan secara maksimal. Capaian dihitung dari target anggaran pada program/kegiatan dibanding dengan realisasi. Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tabel 2. 10 (T-C.24) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
BIRO PEMERINTAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	400.773.724	-	-	-	-	399.063.891	-	-	-	-	99,57	-	-
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	-	-	-	908.820.340	-	-	-	-	797.436.204	-	-	-	-	87,74	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	608.758.000	-	-	-	-	597.957.050	-	-	-	-	98,23	-	-
Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan	-	-	-	-	1.868.296.600	-	-	-	-	1.776.165.600	-	-	-	-	95,07	-	-
Program Penataan Daerah Otonom Baru	-	-	-	-	402.040.000	-	-	-	-	348.037.850	-	-	-	-	86,57	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	429.429.300	-	-	-	-	269.534.350	-	-	-	-	62,77	-	-
Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	-	-	-	-	996.190.000	-	-	-	-	903.266.700	-	-	-	-	90,67	-	-
Program Kerjasama Kawasan Andalan	-	-	-	-	225.700.000	-	-	-	-	200.462.100	-	-	-	-	88,82	-	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	-	-	-	-	186.000.000	-	-	-	-	164.762.800	-	-	-	-	88,58	-	-
Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Antara Daerah Provinsi	-	-	-	-	665.021.000	-	-	-	-	476.729.840	-	-	-	-	71,69	-	-
Program Penataan dan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja -Dalam Rangka Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	224.296.630	-	-	-	-	6.142.694.385	-	-	-	-	93,3	-	-
JUMLAH					6.915.325.594					6.142.694.385					88,83	-	-
BIRO HUKUM DAN HAM																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.400.100	428.718.000	166.941.528	492.928.909	676.887.300	421.199.500	426.830.220	166.840.687	491.664.063	628.010.351	99,01	99,55	99,93	99,74	92,78	251.487.200	99,85
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	416.522.000	429.690.000	1.208.137.000	597.700.000	154.840.000	415.677.000	415.980.300	1.146.896.220	597.700.000	153.195.000	99,79	96,8	94,93	100	98,94	561.377.800	99,95
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	116.400.000	189.400.000	361.680.000	133.150.000	-	116.400.000	189.190.000	361.625.000	133.150.000	-	100	99,58	99,98	100	-	200.157.500	99,99



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	882.173.500	1.072.925.000	1.271.975.359	1.396.400.000	859.592.700	881.564.200	1.068.871.975	1.259.343.500	1.373.349.020	837.365.358	99,93	99,62	99	98,34	97,41	1.096.613.311,8	99,5
Peningkatan Sistem Legislasi Daerah	528.379.400	1.632.385.000	1.454.308.500	2.011.529.000	799.129.225	520.306.900	1.613.265.840	1.439.779.943	1.986.215.008	780.519.021	98,47	98,82	99	98,74	97,67	1.285.146.225	98,85
Peningkatan Pemahaman Produk Hukum Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Secara berkesinambungan	1.205.783.400	764.782.000	1.327.022.000	950.050.000	1.566.723,78	1.197.113.800	754.727.600	1.321.215.500	946.875,79	1.326.776.688	99,28	98,68	99,56	99,66	84,68	849.840.824,76	99,5
Peningkatan dan Penegakan Hukum dan HAM dalam Rangka Pemantapan Advokasi dan Pengamanan Yuridis Kebijakan Pemerintah	974.471.000	1.282.100.000	1.472.575.000	1.698.500.000	971.482.000	972.405.580	1.273.766.760	1.459.892.567	1.679.385.247	958.285.386	99,78	99,35	99,13	98,87	98,64	1.279.825.600	99,65
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	174.370.600	-	186.350.000	281.800.000	154.600.000	171.537.500	-	185.610.000	280.997.000	146.572.800	99,37	-	99,6	99,71	94,81	199.280.150	94,45
Jumlah	4.298.099.900	5.800.000.000	7.448.989.387	7.562.057.909	3.618.097.949	4.696.204.480	5.742.632.695	6.194.307.197	6.543.407.214	4.830.724.604	99,33	98,96	98,89	99,38	96,7	5.745.449.029	99,45
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.098.977.013	1.768.204.030	2.374.614.690	2.012.854.396	3.252.447.396	1.083.123.100	1.768.204.030	2.374.614.690	2.012.854.396	3.168.117.897	99	100	100	100	97		99
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	1.110.539.940	671.842.820	907.500.000	1.290.380.290	-	1.110.539.940	671.842.820	907.500.000	1.306.886.690	-	100	100	100	101	995.065.763	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	-	22.195.000	113.572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.883.500	-
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	2.716.150.000	1.728.907.763	1.624.862.910	1.239.100.375	2.048.500.000	2.677.682.017	1.728.907.763	1.624.862.910	1.239.100.375	2.048.500.000	99	100	100	100	100	1.871.504.210	100
Program Kerjasama Informasi dengan Media	4.068.320.000	4.219.073.065	4.552.392.008	4.761.116.432	6.515.000.000	4.068.320.000	4.219.073.065	4.552.392.008	4.761.116.432	6.451.319.921	100	100	100	100	99	4.823.180.301	100
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.057.555.000	1.280.011.500	977.725.107	2.037.446.184	-	1.049.999.000	1.280.011.500	977.725.107	2.037.446.184	-	100	100	100	100		1.338.184.448	100
Jumlah	8.941.002.013	10.106.736.298	10.201.437.535	10.980.212.387	13.219.899.686	8.879.124.117	10.106.736.298	10.201.437.535	10.958.017.387	12.974.824.508	99	100	100	100	99	10.689.857.584	83
BIRO PEREKONOMIAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.124.178.000	941.675.000	2.287.328.008	798.267.712	1.577.524.595	1.095.306.127	849.099.790	2.234.308.163	781.836.392	1.563.226.442	97,43	90,17	97,68	97,94	99,09	1.345.794.663	96,46%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	63.300.000	250.000.000	180.000.000	100.000.000	340.000.000	62.750.000	247.100.000	148.500.000	100.000.000	339.400.000	99,13	98,84	82,50	100	99,82	186.660.000	96,06%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.250.000	387.532.900	362.675.100	393.750.000	390.000.000	339.400.000	342.000.000	294.872.400	383.773.900	382.307.900	85,22	88,25	81,30	97,47	98,03	386.441.600	90,05%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Perekonomian Daerah	2.406.263.300	3.816.392.000	2.403.992.500	2.539.060.564	4.027.966.217	1.991.748.400	2.321.876.895	3.653.644.623	2.297.334.799	2.344.949.736	82,77	60,84	100	90,48	58,22	3.038.734.916	88,86
Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	105.930.000	1.242.768.000	643.631.000	792.086.000	908.231.000	1.037.017.333,69	102.815.700	1.167.673.000	626.349.500	778.280.408	100	8,27	100	79,08	85,69	738.529.200	100
Program Pembinaan Sarana Perekonomian	108.360.000	-	-	-	-	105.745.000	-	-	-	-	97,59	-	-	-	-	108.360.000	97,59
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	829.020.000	-	-	-	-	772.595.700	-	-	-	-	93,19	-	-	-	-	829.020.000	93,19
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi	398.250.000	342.000.000	362.675.100	393.750.000	-	387.532.900	294.872.400	353.773.900	382.307.900	-	97,31	86,22	97,55	97,09	-	374.168.775	94,54
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi	2.406.263.300	3.816.392.000	2.403.992.500	2.539.060.564	4.027.966.217	1.991.748.400	2.321.876.895	3.653.644.623	2.297.334.799	2.344.439.383	82,77	60,84	100	90,48	58,20	3.038.734.916	88,86
Jumlah	7.839.814.600	10.796.759.900	8.644.294.208	7.555.974.840	11.271.688.029	7.783.843.861	6.479.641.680	11.506.416.709	6.868.937.290	7.752.603.869	99,29	60,01	100	90,91	68,78	9.221.706.315	90,42
BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.416.463.800	967.090.000	1.674.716.406	924.348.252	-	1.342.482.500	929.001.620	-	-	-	94,78	96,06	-	-	1.245.654.615	95,42
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	-	1.661.221.026	213.290.000	781.760.188	-	-	1.557.393.450	184.316.000	773.183.350	-	-	94	-	-	885.423.738	94



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	438.300.000	464.480.000	634.380.000	-	-	437.562.000	-	-	-	-	99,83	-	-	512.386.667	99,83
Program Pengaturan Usaha Jasa Pembangunan	-	1.414.750.000	2.140.497.659	1.630.437.227	1.960.782.780	-	1.396.998.900	2.096.364.320	-	-	-	98,75	-	-	-	1.786.616.917	98,75
Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	-	4.518.786.200	3.632.340.000	3.929.875.412	3.500.600.000	-	4.270.140.360	3.257.647.992	-	-	-	99,97	95,89	-	-	3.895.400.403	97,93
Program Pengembangan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.883.277.200	-	-	-	-	2.812.852.500	-	-	-	-	97,56	-	-	-	-	2.883.277.200	97,56
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	797.983.200	-	-	-	-	792.021.510	-	-	-	-	99	-	-	-	-	797.983.200	99
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	121.544.100	-	-	-	-	121.544.100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	121.544.100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	1.723.940.064	2.851.463.602	-	-	-	1.602.775.474	2.779.673.491	-	-	-	84,21	97,48	2.287.701.833	90,845
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	2.165.283.668	1.812.246.802	--	-	1.659.550.691	1.623.012.344	-	-	-	76,64	89,56	2.165.283.668	83,1
Jumlah	3.802.804.500	7.350.000.000	8.839.448.685	7.912.799.045	7.801.871.220	2.934.396.600	7.009.647.660	8.278.214.878	7.428.132.562	7.653.776.097	98,94	98,64	95,46	93,72	98,35	7.141.384.690	97,022



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
BIRO KESEJAHTERAAN																	
Program pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	7.908.591.750	2.090.808.200	-	-	-	7.462.814.511	2.069.461.746	-	-	-	94,36	98,98	4.999.699.975	96,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	460.000.000	-	-	-	-	456.232.000	-	-	-	-	99,18	-	460.000.000	99,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	-	-	85.400.000	-	-	-	-	84.737.000	-	-	-	-	99,22	-	85.400.000	99,22
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	-	-	-	113.425.000	-	-	-	-	93.010.000	-	-	-	-	82	-	113.425.000	82,00
Program Peningkatan Kelembagaan, data dan Informasi	-	-	-	407.250.000	-	-	-	-	390.303.149	-	-	-	-	95,84	-	407.250.000	95,84
Program peningkatan kapasitas dan kinerja skpd	-	-	-	3.557.500.417	25.000.000	-	-	-	3.498.011.391	15.000.000	-	-	-	98,33	60	1.791.250.209	79,17
Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja	-	-	-	3.489.365.800	596.142.800	-	-	-	3.442.547.767	589.690.805	-	-	-	98,66	98,92	2.042.754.300	98,79
Program pengembangan, kebijakan, perlindungan dan kerawanan sosial	-	-	-	7.192.506.284	1.594.801.145	-	-	-	7.046.363.507	1.581.732.885	-	-	-	97,97	98,67	4.393.653.715	98,32



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan	-	-	-	11.756.947.500	5.109.591.000	-	-	-	11.641.461.948	5.054.821.300	-	-	-	99,02	99,18	8.433.269.250	99,10
Program Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama	-	-	-	3.393.515.000	1.309.832.500	-	-	-	3.364.253.900	1.289.738.385	-	-	-	99,14	99,74	2.351.673.750	99,44
Program Peningkatan Koordinasi dan pelayanan ibadah haji	-	-	-	1.480.500.000	792.094.000	-	-	-	1.417.930.600	790.042.500	-	-	-	95,77	99,2	1.136.297.000	97,49
Program Pembinaan pemuda, olahraga, pendidikan dan seni budaya	-	-	-	2.468.686.844	1.137.180.000	-	-	-	2.404.026.494	1.122.050.764	-	-	-	97,38	98,93	1.802.933.422	98,16
Program Pengelolaan dan Keberagaman kekayaan dan nilai budaya	-	-	-	2.601.500.000	115.175.000	-	-	-	2.583.964.500	114.248.750	-	-	-	99,33	98,47	1.358.337.500	98,90
Program peningkatan penanggulangan napza dan hiv/aids	-	-	-	8.230.175.300	236.225.000	-	-	-	8.117.663.330	233.995.000	-	-	-	98,63	99,06	4.233.200.150	98,85
Program Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	-	-	-	388.050.000	-	-	-	-	382.861.000	-	-	-	-	98,66	-	388.050.000	98,66
-	-	-	-	511.325.000	-	-	-	-	501.633.000	-	-	-	-	98,1	-	511.325.000	98,10



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Pembinaan Penyandang sosial dan trauma	-	-	-	368.450.000	-	-	-	-	350.100.000	-	-	-	-	95,02	-	-	-
Program Bantuan dan jaminan Sosial	-	-	-	118.450.000	-	-	-	-	102.255.000	-	-	-	-	86,33	-	-	-
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan n Bencana	-	-	-	191.650.000	-	-	-	-	179.282.760	-	-	-	-	93,55	-	-	-
Program pembinaan serta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	-	-	-	358.375.000	-	-	-	-	333.574.000	-	-	-	-	94,75	-	-	-
Program Pemeliharaan Ketentraman, ketertiban masyarakat dan percepatan tindak kriminal	-	-	-	205.000.000	-	-	-	-	197.363.300	-	-	-	-	96,27	-	-	-
Program Pengembangan nilai budaya	-	-	-	1.199.400.000	-	-	-	-	1.172.097.695	-	-	-	-	97,72	-	-	-
Program Pengembangan Kemitraan	-	-	-	717.500.000	-	-	-	-	689.121.600	-	-	-	-	96,04	-	-	-
Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-	-	332.500.000	-	-	-	-	312.719.000	-	-	-	-	94,05	-	-	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	-	-	-	116.825.000	-	-	-	-	108.150.000	-	-	-	-	92,57	-	-	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	-	-	-	200.400.000	-	-	-	-	188.656.900	-	-	-	-	94,14	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	-	-	-	200.400.000	-	-	-	-	188.656.900	-	-	-	-	94,14	-	-	-
Program Peningkatan Kelembagaan, data dan Informasi	-	-	-	407.250.000	-	-	-	-	390.303.649	-	-	-	-	95,84	-	-	-
Program Pemberantasan buta aksara al-quran	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	398.546.700	-	-	-	-	99,64	-	-	-
Jumlah	-	-	-	58.660.538.895	13.006.849.645	-	-	-	57.315.984.701	12.860.782.135	-	-	-	95,98	33,97	35.833.694.270	65
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.794.600	945.679.878	1.919.171.048	1.347.677.197	2.057.155.140	1.113.512.062	888.286.443	1.908.685.514	1.329.816.775	2.024.676.750	98,82	93,93	99,45	98,67	98,42	1.479.295.573	97,86
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	434.984.500	460.000.000	552.285.000	314.140.000	195.490.000	420.851.450	415.970.050	543.287.000	310.471.000	194.643.440	96,75	90,43	98,37	98,83	99,57	391.379.900	96,79
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	268.625.000	350.000.000	327.000.000	500.000.000	302.785.000	247.835.800	330.290.800	299.448.800	493.148.134	296.666.142	92,26	94,37	91,57	98,63	97,98	349.682.000	94,96



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.673.400.000	8.092.600.000	6.557.800.000	6.779.800.000	11.836.482.500	5.666.728.700	7.998.471.975	5.808.595.680	6.741.707.950	11.809.215.675	99,88	98,84	88,58	99,44	99,77	7.788.016.500	97,30
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	42.449.843.200	32.642.375.883	30.715.307.684	31.414.765.270	-	41.467.667.662	32.039.965.425	30.273.408.677	31.140.680.702	-	97,69	98,15	98,56	99,13	34.305.573.009	98,38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	1.981.940.030	2.629.854.730	2.776.646.931	2.630.833.080	-	1.920.576.150	2.530.287.254	2.764.264.399	2.623.535.990	-	96,90	96,21	99,55	99,72	2.504.818.693	98,10
Jumlah	7.503.804.100	54.280.063.108	44.628.486.661	42.433.571.812	48.437.510.990	7.448.928.012	53.021.263.080	43.130.269.673	41.912.816.935	48.089.418.699	96,93	95,36	95,39	98,95	99,10	7.803.127.612	97,23
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.000.000	996.972.400	-	-	-	788.486.600	984.833.300	-	-	-	98,93	98,78	-	-	-	886.650.950	98,86
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	4.553.512.500	6.847.706.200	-	-	-	4.471.767.491	6.700.672.470	-	-	-	98,2	97,85	-	-	-	5.586.219.981	98,03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1.186.196.500	2.238.865.800	-	-	-	1.175.473.350	2.136.888.400	-	-	-	99,1	95,45	-	-	-	1.656.180.875	99,1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	313.291.000	-	-	-	-	310.726.000	-	-	-	-	99,18	-	-	-	-	310.726.000	99,18
Jumlah	6.850.000.000	10.083.544.400	-	-	-	6.746.453.441	9.822.394.170	-	-	-	98,49	97,41	-	-	-	5.248.423.806	97,95



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga dapat dilihat pada seluruh kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan menggunakan anggaran yang ada dan secara keseluruhan dapat mencapai sasaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam mendukung pencapaian sasaran. Indikator kinerja yang masih relevan dan perlu mendapat perhatian terkait pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Survei Kepuasan Masyarakat

2.4.Kelompok Layanan Sasaran

Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dengan kelompok Layanan sasaran adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, LKPP, Bank Indonesia terkait Inflasi Daerah, Perguruan Tinggi terutama untuk pencapaian kinerja LPPD, LKPJ, SPM, Tata Cara Kerjasama Daerah, Kebutuhan Produk Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

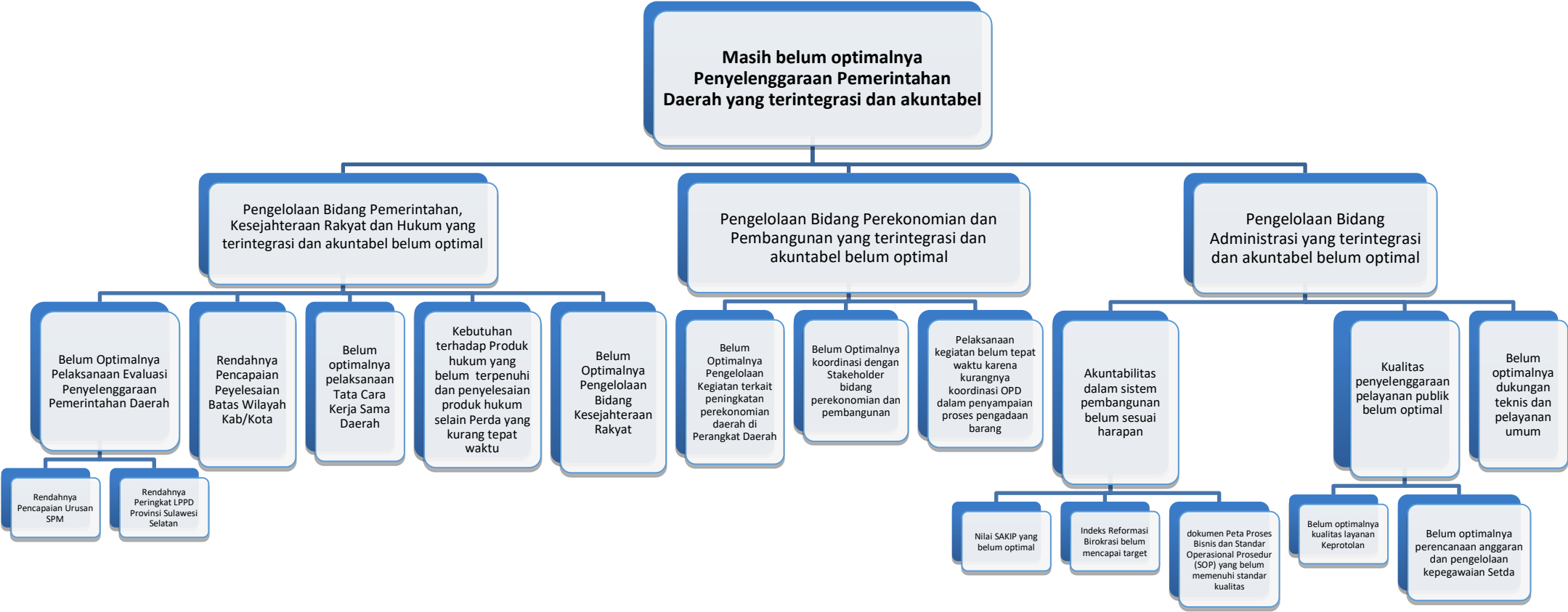
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja di masa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah **"Masih belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dan akuntabel "**, yang tergambar dari lemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada pohon masalah:



Gambar 3.1 Pohon Masalah





Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A	Biro Organisasi		
1	Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal	Pelayanan publik belum memenuhi indikator instrumen evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
			Belum optimalnya penerapan Gerakan “ Satu Instansi Satu Inovasi ” (one agency one innovation), dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
2	Keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja	Peningkatan Nilai SAKIP yang belum optimal	Penyajian Laporan Kinerja belum sesuai dengan PerMenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
			Belum sinerginya penyusunan dokumen perencanaan
3	Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Penyusunan dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum memenuhi standar kualitas	Rendahnya pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target	Perangkat Daerah belum seluruhnya melaksanakan PMPRB
			Tim Asesor yang dibentuk di internal unit kerja belum optimal
			Masih kurangnya tanggung jawab masing-masing OPD pada 8 area perubahan yang menjadi skala prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Penataan nomenklatur Perangkat Daerah	Fasilitasi kebijakan penataan nomenklatur berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan
		Penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	Fasilitasi kebijakan penataan produk hukum susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja bagi 39 perangkat daerah
		Pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi	Fasilitasi rekomendasi Gubernur terhadap pembentukan, pengubahan dan peningkatan UPT Kementerian
		Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah	Pemantauan, pendampingan dan evaluasi perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi
		Kebutuhan jabatan pada perangkat daerah belum memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai ketentuan	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah tidak berdasar pada kebutuhan organisasi, cenderung menyesuaikan dengan <i>bezetting</i> pegawai yang ada
			Khusus kebutuhan Jabatan Fungsional yang diusulkan tidak berdasarkan kebutuhan organisasi tetapi menyesuaikan dengan pegawai akan beralih ke Jabatan Fungsional sehingga analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun menyesuaikan dengan orang yang akan menduduki jabatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan <i>riil</i> organisasi
B	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
1	Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Utama di bidang Pemerintahan	Rendahnya Peringkat LPPD Provinsi Sulawesi Selatan	Rendahnya Pemahaman OPD terhadap Penyusunan dokumen LPPD dan belum efektifnya penyusunan data LPPD
			Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih kurangnya pembinaan tentang EPPD
		Rendahnya Pencapaian Penyelesaian Batas Wilayah Kab/Kota	Terhambatnya proses penyelesaian segmen batas wilayah kab/kota dan masih banyaknya konflik antar batas wilayah
		Rendahnya Pencapaian Urusan SPM	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Bidang Sosial dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Belum Optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan Tata Cara Kerjasama Daerah	Kurang Berfungsinya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
		Belum Optimalnya Pemahaman Daerah tentang Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Masih rendahnya koordinasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat
C	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
1	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Pengelolaan Kegiatan terkait peningkatan perekonomian daerah di Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Koordinasi pencapaian tujuan sasaran terkait peningkatan perekonomian daerah dan Perencanaan Kegiatan di Perangkat daerah
		Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personil terkait pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM dan belum tersedianya data bidang perekonomian dan pembangunan
			Belum tersedianya data analisa perekonomian
			Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik
C	Biro Hukum		
1	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	Banyaknya Kebutuhan terhadap Produk hukum yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Masih rendahnya kapasitas/ kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan.
			Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
			Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan
			Lemahnya pengumpulan/ penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan;
			Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
D	Biro Kesra		
1	Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya peran lembaga keagamaan	Rendahnya fasilitas keagamaan yang ada



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya pembinaan dan penanganan konflik antar umat beragama
			Kurangnya pengetahuan dan skill aparatur terkait bidang keagamaan
			Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan
		Persentase penduduk Berumur 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab hanya sebesar 36,36 persen (Data BPS 2018)	Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab
		Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret tahun 2018 sebesar 792,64 ribu jiwa atau 9,06 persen (Data BPS 2018)	Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin
			Kurangnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya peran bidang kesra dalam menangani permasalahan sosial masyarakat seperti meningkatnya pengguna narkoba dan kejahatan seksual	Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual
			Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah belum berjalan secara optimal
E	Biro Pengadaan Barang/Jasa		
1	Pencapaian Kinerja dan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang	Kurangnya kesadaran dan pemahaman PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP
		Proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu	Terlambatnya upload RUP dari masing-masing OPD
G	Biro Umum		
1	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, standar harga	Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di OPD



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Barang dan rencana pemeliharaan barang di OPD	Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi
2	Dukungan Teknis dan Pelayanan Umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum serta	Pelaksanaan SOP masih belum optimal
			Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah
3	Pencapaian kinerja dan Layanan Keprotokolan	Belum optimalnya kualitas layanan Keprotokolan	Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal
			Tingkat pemahaman SOP keprotokolan rendah



Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD	Permasalahan Pelayanan Setda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan	Kualitas Pelayanan Publik	Komitmen pimpinan atas pemenuhan indikator penyelenggaraan pelayanan publik	Pemenuhan/kepatuhan terhadap aspek, komponen dan indikator penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu : ✓ Aspek Kebijakan Pelayanan Publik (SPP, Maklumat Pelayanan, SKM, Budaya pelayanan) ✓ Aspek Profesionalisme SDM ✓ Aspek Sarana dan Prasarana ✓ Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik ✓ Aspek Konsultasi dan Pengaduan ✓ Aspek inovasi



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJP (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan Setda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur penyelenggara pelayanan publik masih kurang	Profesionalisme SDM Aparatur penyelenggara pelayanan publik
			Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah Kab/Kota terhadap anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik	Pedoman aturan yang jelas
			Sikap masa bodoh atau apatis dari masyarakat pengguna pelayanan publik	Pengawasan dan Akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment bagi penyelenggara pelayanan publik
			Kurangnya sosialisasi dan pendampingan menemu kenali inovasi pelayanan publik serta bimbingan teknis dan <i>coaching</i> terkait penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor 067/1783/B.Ortala tentang pelaksanaan Gerakan <i>One Agency One Inovation</i> di Sulawesi Selatan dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Nasional



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah
			Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja	Penerapan SOP yang konsisten dan perencanaan Sasaran Kinerja Pegawai
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Masih minimnya pemahaman pemangku jabatan terkait pentingnya penyusunan peta proses bisnis	Peta Proses Bisnis dapat menjadi rujukan bagi TAPD dan APIP dalam melakukan pembagian dan pengawasan anggaran
				Peta Proses Bisnis merupakan dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi keharusan bagi setiap OPD dalam rangka melakukan pekerjaan/pelayanan yang optimal
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya seluruh OPD pada pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), terkait 8 area perubahan yang menjadi pokok pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangkapeningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	Adanya pengintegrasian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Masih rendahnya komitmen pimpinan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersedianya tenaga asesor yang memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi
			Pola pembinaan aparat yang belum berorientasikan pada peningkatan kinerja	
		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel	Tersedianya pedoman pemetaan dan penataan nomenklatur perangkat daerah
		Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Utama di bidang Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap pemenuhan kebijakan daerah	Tersedianya pedoman nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh kementerian



Visi RPJMD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Belum adanya kebijakan strategis pemerintah pusat yang menetapkan atas kebutuhan dari penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah	Adanya komunikasi yang teradministrasi dengan baik, serta adanya penetapan pedoman terhadap pembentukan unit kerja pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
			Pemetaan perangkat daerah yang efektif dan efisien belum optimal	Adanya kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah
			Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap substansi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Penataan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah kebutuhan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, sehingga harus disusun sebagai kebutuhan organisasi
			Kurangnya Pemahaman OPD terhadap LPPD, Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD	Komitmen Kepala OPD; Bimtek Kepala OPD tentang LPPD



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kurangnya Pembinaan Terhadap 24 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota
			Kurangnya anggaran untuk melakukan Koordinasi, Pembinaan, fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Untuk Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota
		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	Belum adanya <i>blueprint</i> pengembangan industri kecil mikro, Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM, Belum tersedianya data analisa perekonomian, Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah, Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik, Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	Adanya komitmen pimpinan Adanya sinergi koordinasi penyusunan Kebijakan pemberdayaan IKM (Adanya koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan)



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	Masih rendahnya kapasitas/kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan, Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan, Lemahnya pengumpulan/penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan; Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)y	- Adanya komitmen pimpinan untuk memberi kesempatan kepada aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. - Adanya koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan - Adanya koordinasi perangkat daerah (PD) program perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan produk hukum daerah. - Adanya Koordinasi Data Produk Hukum Daerah ke Perangkat Daerah (PD) - Adanya dukungan sarana dan prasarana dan pengoperasian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum optimal peran Lembaga keagamaan dan fasilitas keagamaan; Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani, media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan
			Belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin, Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin,	Adanya keyakinan yang kuat pimpinan daerah bahwa keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterakan masyarakat.



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual, Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah belum berjalan secara optimal, Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan	Adanya komitmen pimpinan, aturan yang dapat dipedomani, media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian Kinerja dan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP; Terlambatnya upload RUP dari masing-masing OPD, Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang	Adanya Aplikasi SPSE; Adanya Pokja yang Bersertifikasi; Adanya Komitmen Pimpinan Daerah
			Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di OPD; Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi, Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, standar harga barang dan rencana pemeliharaan barang di OPD	Sarana pengolahan data



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’				
No.	Misi dan Program RPJPD (2005-2025)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan serta layanan umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum , Pelaksanaan SOP masih belum optimal; Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; Belum optimalnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan Daerah	Komitmen pimpinan dan media komunikasi
		Pencapaian kinerja dan Belum optimalnya pelayanan keprotokolan	Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal, lemahnya koordinasi lintas OPD, terbatasnya Kompetensi SDM untuk pelayanan keprotokolan dan Komunikasi terhadap Pimpinan Daerah.	Komitmen pimpinan dan Sarana Pendukung



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan seperti pada tabel matriks. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM tenaga pendamping pada bidang Kesra
2. Kuantitas dan Kualitas SDM pada bagian / unit kerja tertentu masih kurang
3. Tidak tersedianya tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi
4. Rendahnya kompetensi SDM

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.



Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah; 2. Pengelolaan Barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri 3. Optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan; 4. Meningkatnya tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri.	1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Penyusunan kebijakan Belum berdasarkan suatu telaah atas data/ informasi yang kuat dan dan kapasitas SDM baik skill dan pemahaman tentang sasaran kinerja	Ketersediaan data/informasi pendukung dan penguasaan analisis kebijakan	Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis.
		Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1. Belum optimal peran Lembaga keagamaan dan fasilitas keagamaan; 2. Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab; 3. Belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin,	1. Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani, 2. Media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan



Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			4. Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin, 5. Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual, 6. Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah belum berjalan secara optimal, 7. Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan.	



Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	1. Masih rendahnya kapasitas/ kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan, 2. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3. Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan, 4. Lemahnya pengumpulan/ penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan; 5. Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).	1. Adanya kerjasama swakelola dengan PP 2. OTODA UNIBRAW dalam penyusunan Raperda 3. Adanya legal drafting produk hukum selain 4. Perda yang disusun oleh OPD



Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani
		Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	1. Belum adanya <i>blueprint</i> pengembangan industri kecil mikro, 2. Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM, 3. Belum tersedianya data analisa perekonomian, 4. Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah, 5. Belum adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik, 6. Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	1. Adanyakomitmen pimpinan 2. Adanya sinergi koordinasi penyusunan 3. Kebijakan pemberdayaan IKM 4. Adanya koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan



Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang dan kapasitas SDM baik skill dan pemahaman tentang sasaran kinerja 1. Koordinasi Pencapaian PK dan IKU seluruh Perangkat Daerah belum optima 2. Pengendalian atas Pencapaian seluruh target pembangunan belum dilaksanakan secara optimal	Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP; Terlambatnya upload RUP dari masing-masing OPD 1. Kualitas indikator dan kapasitas Perangkat Daerah dalam mendorong pencapaian target tujuan/ sasaran kinerja yang ditetapkan 2. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kualitas tolok ukur keberhasilan kebijakan yang ditetapkan 3. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah	Adanya Aplikasi SPSE; Adanya Pokja yang Bersertifikasi; Adanya Komitmen Pimpinan Daerah 1. Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (diampu oleh Biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi Akuntabilitas 2. Pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/ kegiatan pembangunan



Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah
	5. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan umum	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan serta layanan umum	1. Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum, Pelaksanaan SOP masih belum optimal; 2. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan Daerah 4. Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal, lemahnya koordinasi lintas OPD, terbatasnya Kompetensi SDM untuk pelayanan keprotokolan dan Komunikasi terhadap Pimpinan Daerah;	Komitmen pimpinan, sarana pendukung dan media komunikasi



Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas ketersediaan data dan informasi bidang Kesra;
3. Meningkatnya tata kelola dan kualitas produk hukum ditetapkan tepat waktu;
4. Meningkatnya tata kelola dan kualitas data informasi bidang ekonomi dan administrasi pembangunan;
5. Meningkatnya tata kelola dan kualitas pengelolaan barang dan jasa;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
7. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan umum

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi pusat dan Provinsi. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran serta target setiap tahunnya.

A. Isu Strategis

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Sekretariat Daerah dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dokumen terkait serta mempertimbangkan kondisi- kondisi terkini, terdapat isu-isu strategis dapat diidentifikasi dan direviu kembali yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari beberapa dari faktor-faktor seperti pada tabel berikut:



Tabel 3.4 Identifikasi Isu- isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	Isu Strategis
1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik yang inovatif
		Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah yang bersih melayani
		Penguatan fungsi unit kerja dalam pelayanan
2.	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L	Pelaksanaan pelayanan dasar ditentukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat;
		Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan capaian peringkat LPPD
		Reformasi Birokrasi
3.	Sasaran Jangka Menengah dan Renstra Perangkat Daerah	Peningkatan fungsi dalam mendukung pencapaian SDGs dan revolusi industri
		Aksesibilitas usaha kecil dan mikro terhadap lembaga keuangan dan pemberdayaan industri kecil mikro
4.	Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan fungsi dan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Pelayanan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum secara inklusif
		Produk hukum yang terbit tepat waktu
		Pelayanan perangkat daerah
5.	Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan produk hukum dan tatalaksana pengelolaan (Pencapaian SDGs)
		Peningkatan fungsi dan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan



Adapun isu-isu strategis yang terkemuka yang dihadapi pada pemerintahan daerah pada umumnya, dan pada khususnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perizinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, laporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan



lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam rangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*. Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan



yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan berkoordinasi.

4. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional reengineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Dalam rangka mendukung program nyata gubernur Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Guna mendukung Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Unit Kerja dalam menunjang pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah mendukung misi RPJPD yaitu **Misi 3 : “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang kondusif”** dijalankan melalui kebijakan Penyelenggaraan agenda Reformasi Birokrasi dalam perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik .

4.1.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah dirumuskan bersama adalah:

- 1. Meningkatkan efektifitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah yang akuntabel dan mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter.**

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum.
2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa.
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan



penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum

4. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
5. Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melihat rumusan lengkap target indikator Sasaran Sekretariat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2



Tabel 4.1 T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan efektifitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah yang akuntabel dan mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter.	1.1 Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	1. Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
			2. Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
			3. Persentase Usulan Penyelesaian Batas Wilayah Kab/Kota yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	
			4. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
			5. Indeks Reformasi Hukum	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
			6. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026	
		1.2 Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	7. Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	
			8. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	
			9. Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	
			10. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	72,40%	73%	74%	76%	78%	
		1.3 Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, dan Umum	11. Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	10,89	11,01	12	13	14	
			12. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	N/A	83%	85%	87%	89%	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026	
			13. Nilai Evaluasi Kelembagaan	74,8	61	63	65	70	
			14. Indeks Pelayanan Publik	4,34	4,34	4,38	4,40	4,51	
			15. Nilai Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik	61,94	73,38	78	79	80	
			16 Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95(sangat puas)	



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026	
			17. Indeks pelayanan Keuangan lingkup Sekretariat Daerah yang tepat waktu	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	
			18. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	
		1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	19. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	91 (AA)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	
			20. % capaian kinerja Program Perangkat Daerah	98%	99%	100%	100%	100%	
			21. % Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material)	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026	
		1.5 Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	22. Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	



4.1.2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Untuk Kewenangan daerah

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan pemerintah pusat. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur indeks dan penilaian implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara. Penyesuaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam Sistem Hukum, Tata Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam aspek:

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (administrasi maupun teknis);
3. Urusan Pemerintahan (pembagian urusan konkuren dan kewenangan);
4. Penataan Daerah;
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Manajemen ASN
7. dan sebagainya.

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat membentuk dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral; Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan agar: 1. Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan program kerja SKPD baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur agar menyesuaikan dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral.

4.2. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

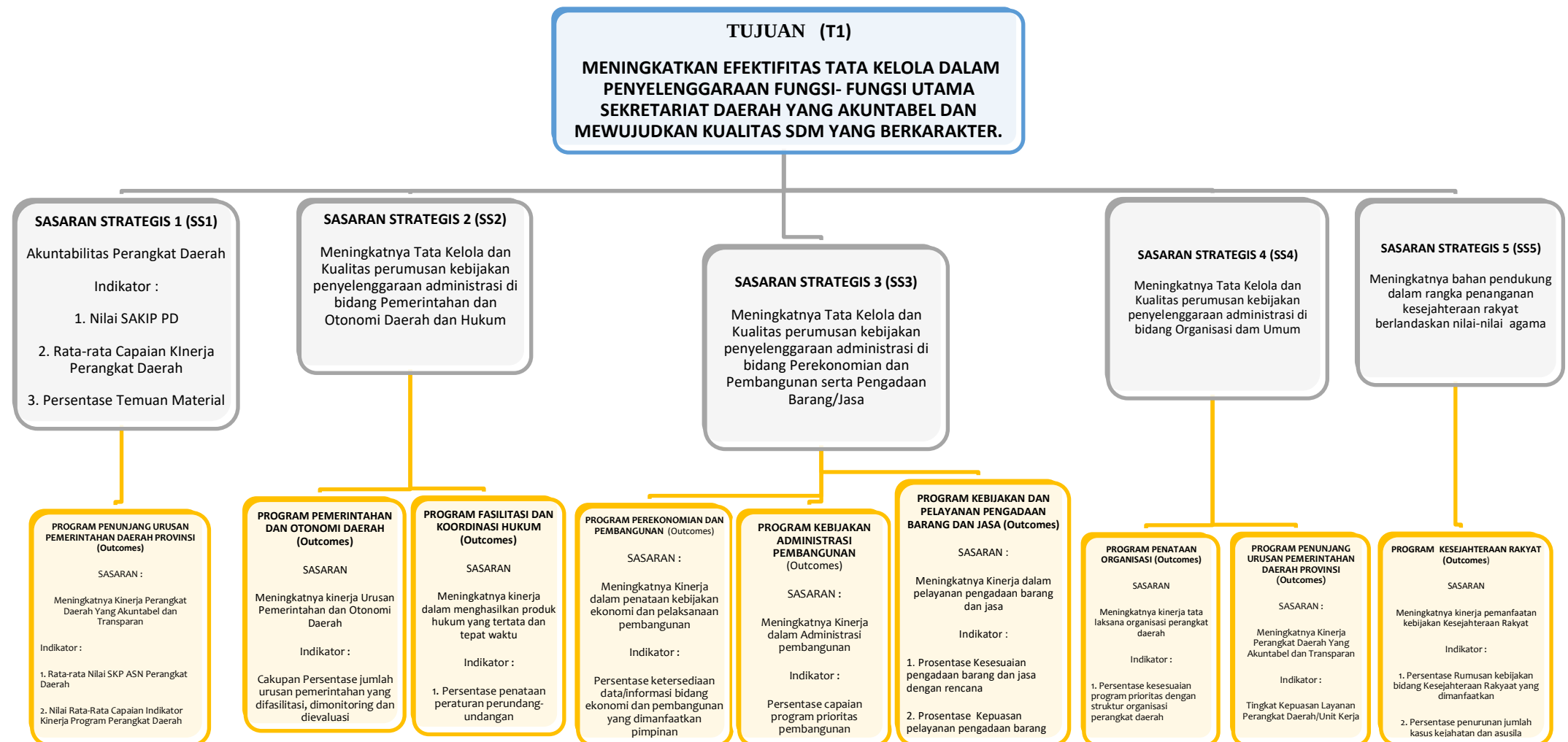


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

Gambar 4.1 CASCADING SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

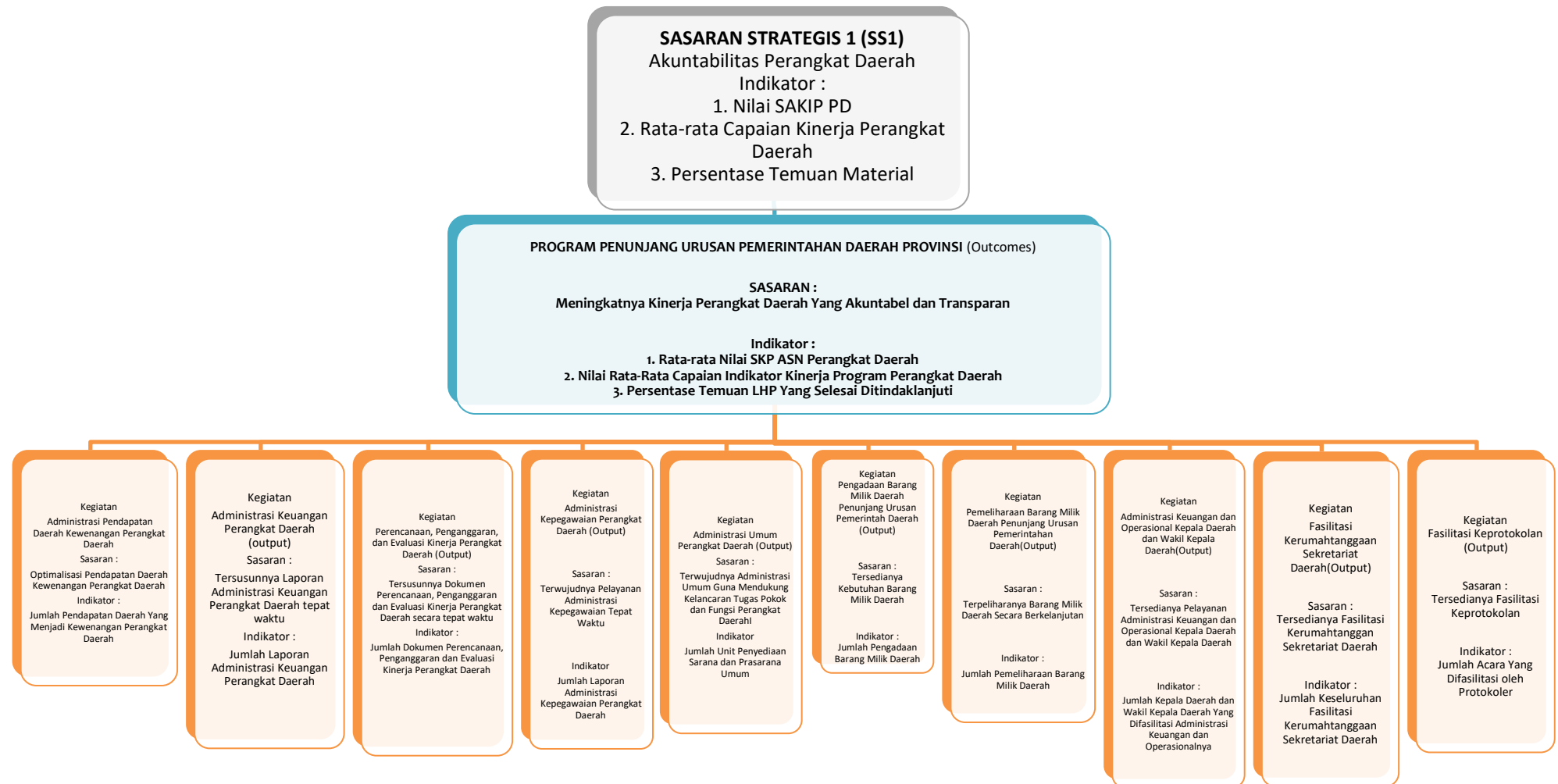


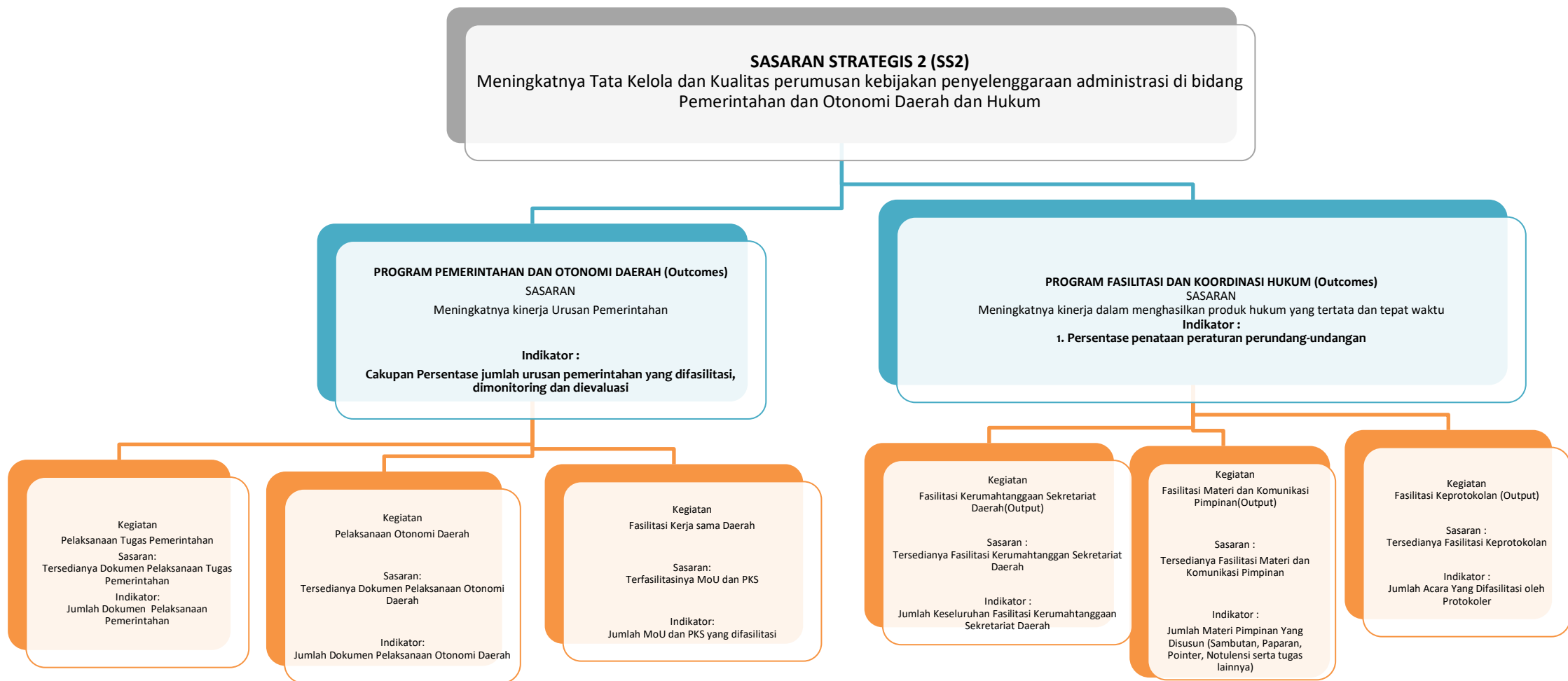


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

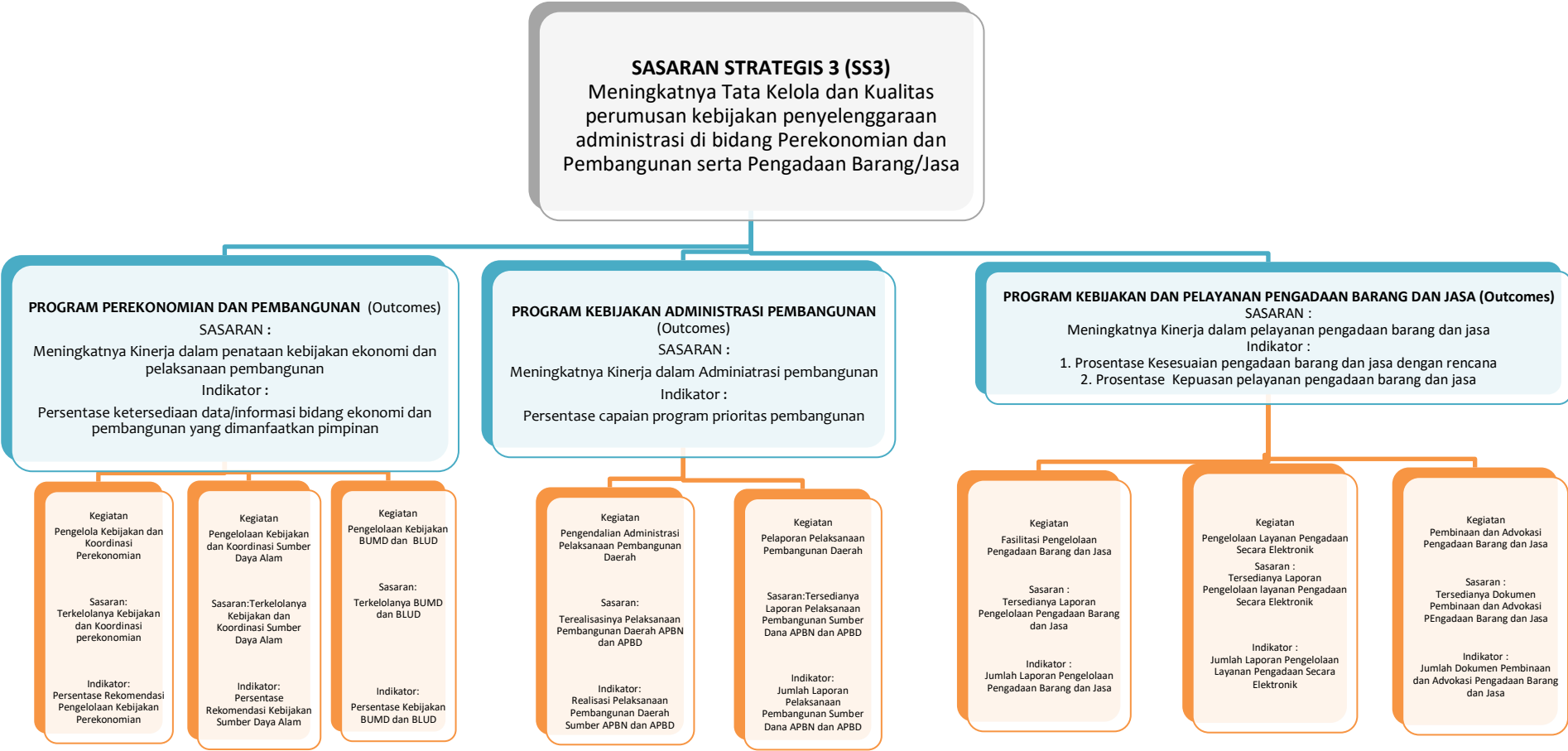
TAHUN 2024 - 2026







RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

SASARAN STRATEGIS 4 (SS4)

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Outcomes)

SASARAN

Meningkatnya kinerja tata laksana organisasi perangkat daerah

Indikator :

Persentase Kesesuaian Program Prioritas dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sasaran:

1. Tefasilitasinya Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Tefasilitasinya Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

Indikator:

1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Persentase Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan analisis Jabatan

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran:

Terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Indikator:

Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Outcomes)

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Transparan

Indikator :

Tingkat Kepuasan Layanan Perangkat Daerah/Unit Kerja

Kegiatan Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah (Output)

Sasaran : Tersedianya Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Keseluruhan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah

Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan (Output)

Sasaran : Tersedianya Fasilitas Keprotokolan

Indikator : Jumlah Acara Yang Difasilitasi oleh Protokoler

SASARAN STRATEGIS 5 (SS5)

Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (Outcomes)

SASARAN

Meningkatnya kinerja pemanfaatan kebijakan Kesra

Indikator :

1. Persentase Rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan
2. Persentase penurunan jumlah kasus kejahatan dan asusila

Kegiatan
Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual
Sasaran:
Tersedianya bahan rumusan kebijakan bidang pembinaan mental dan spiritual
Indikator:
Persentase bahan rumusan Kebijakan bidang pembinaan mental dan spiritual yang dimanfaatkan

Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sasaran:
Tersedianya bahan rumusan kebijakan bidang kesra pelayanan dasar
Indikator:
Persentase bahan rumusan kebijakan bidang kesra pelayanan dasar yang dimanfaatkan

Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sasaran:
Tersedianya bahan rumusan kebijakan bidang kesra Non pelayanan dasar
Indikator:
Persentase bahan rumusan kebijakan bidang kesra Non pelayanan dasar yang dimanfaatkan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, dimana melalui arah kebijakan dapat diterjemahkan program kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Sekretariat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Identifikasi faktor-faktor S.W.O.T. tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan (Strengths)
 1. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah
 2. Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten
 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
 4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana operasional dari pemerintah daerah.
 5. Terbentuknya Aparatur Sipil Negara yang mandiri dan berintegritas.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara belum memadai dari kebutuhan
2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi (IT) oleh sumber daya aparatur.
3. Penyediaan anggaran masih kurang memadai dibanding kebutuhan operasional.

c. Peluang (Opportunities)

1. Kesadaran dan tuntutan OPD akan pelayanan yang bermutu sangat tinggi.
2. Dukungan dari stakeholder terkait cukup tinggi terhadap pelaksanaan Program/kegiatan.
3. Terbukanya dukungan lintas sektor (OPD terkait)
4. Tuntutan peraturan yang kuat akan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas.
5. Adanya keyakinan yang kuat pimpinan daerah bahwa keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterakan masyarakat.

d. Tantangan (Threats)

1. Mutasi sumber daya aparatur
2. Perkembangan teknologi informasi yang belum dimaksimalkan penerapannya
3. Peran pimpinan belum sepenuhnya maksimal.
4. Permasalahan tata kelola dan pembinaan SDM aparatur belum menjadi isu utama dalam perencanaan.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :

1. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;
2. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi



- b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan menghadapi tantangan. (ST) adalah:
 - 1. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
 - 2. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
 - 3. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional
 - 4. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
- c. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
 - 1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia.
 - 2. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik
 - 3. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT) adalah:
 - 1. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur
 - 2. Perbaikan masalah tata kelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.
 - 3. Penerapan Aparatur Sipil Negara Untuk lebih Efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan Tugas kedinasan.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.1 Analisis S.W.O.T.

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
Dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara belum memadai dari kebutuhan	Kesadaran dan Tuntutan OPD akan pelayanan yang bermutu sangat tinggi	Perkembangan teknologi informasi yang belum dimaksimalkan penerapannya	Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.	Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur	Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan	Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia
Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten	Kurangnya penguasaan Teknologi Informasi (IT) oleh sumber daya aparatur	Dukungan dari stakeholder terkait cukup tinggi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan	Mutasi sumber daya aparatur yang telah terlatih ke instansi lain	Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional	Perbaikan masalah tata kelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah	Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;	Peningkatan mekanisme Standar Operasional Prosedur yang baik



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
Tersedianya dukungan sarana prasarana yang memadai	Penyediaan anggaran masih kurang memadai disbanding kebutuhan operasional	Terbukanya dukungan lintas sektor (OPD terkait)	Permasalahan tata kelola dan pembinaan SDM aparatur belum menjadi isu utama dalam perencanaan	Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara Untuk dalam melaksanakan Tugas kedinasan.	Penyelenggaraa n pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran	Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui koordinasi terintegrasi
Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana operasional dari pemerintah daerah		Tuntutan peraturan yang kuat akan tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas	Peran Pimpinan belum sepenuhnya maksimal	Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;		Peningkatan kinerja dalam Pelaksanaan program/kegiatan	



Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
		Adanya keyakinan yang kuat pimpinan daerah bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterakan masyarakat				Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	



Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Adapun **strategi** dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Prov. Sulsel yaitu:

1. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan;
2. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
6. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
7. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional
8. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
9. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia.
10. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik
11. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi
12. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur
13. Perbaikan masalah tata kelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.
14. Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Tugas kedinasan.



Sedangkan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pelaksanaan program / kegiatan;
2. Meningkatkan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Meningkatkan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
6. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
7. Melakukan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja
8. Mengoptimalkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
9. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia.
10. Melakukan penerapan mekanisme Standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
11. Meningkatkan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi
12. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge
13. Melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tata kelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu.
14. Mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Tugas kedinasan.

Hasil analisis di atas dapat dilihat melalui tabel 5.2 dibawah ini.



Tabel 5. 2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’			
Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah yang akuntabel dan mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	Peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah	Meningkatkan tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	1. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran; 2. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.	1. Meningkatkan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran; 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Meningkatkan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum	4. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal. 5. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional	4. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal. Melakukan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’			
Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		6. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan; 7. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia. 8. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi 9. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur 10. Perbaikan masalah tata kelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.	5. Mengoptimalkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan; 6. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia. 7. Meningkatkan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi 8. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui <i>sharing knowledge</i> 9. Melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tata kelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu.



Visi RPJPD : “SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN’			
Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan 1. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan; 2. Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Tugas kedinasan. 3. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik 4. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;	 1. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan 2. Mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Tugas kedinasan. 3. Melakukan penerapan mekanisme Standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi 4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pelaksanaan program / kegiatan
	Meningkatnya bahan pendukung Kebijakan dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama & budaya	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter 1. Peningkatan Kualitas SDM 2. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA 3. Peningkatan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda 4. Peningkatan koordinasi antar stakeholder	Meningkatan Kualitas SDM yang berkarakter 1. Meningkatkan Kualitas SDM 2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA 3. Meningkatkan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda 4. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder



Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan dalam RPD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab VI ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2024-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program
- Sub Kegiatan Perangkat Daerah adalah aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung serangkaian aktivitas pembangunan.
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2024-2026 tertuang pada tabel berikut:



Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Sekretariat Daerah.															
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum.														
4.01.03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Cakupan Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	100 %	100 %	2.227.582.192,00	100 %	2.300.000.000,00	100 %	2.727.582.192,00	100 %	7.255.164.384,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.03.1.01			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	10 Dokumen	11 Dokumen	700.000.000,00	12 Dokumen	850.000.000,00	13 Dokumen	1.147.582.192,00	13 Dokumen	2.697.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.03.1.01.01			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	400.000.000,00	3 Dokumen	950.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
4.01.03.1.01.02			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	350.000.000,00	2 Dokumen	800.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	5 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	7 Dokumen	300.000.000,00	8 Dokumen	397.582.192,00	8 Dokumen	947.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	84 Dokumen	88 Dokumen	1.300.000.000,00	92 Dokumen	1.125.000.000,00	96 Dokumen	1.100.000.000,00	96 Dokumen	3.525.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
		4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	36 Dokumen	40 Dokumen	900.000.000,00	44 Dokumen	650.000.000,00	48 Dokumen	500.000.000,00	48 Dokumen	2.050.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	150.000.000,00	24 Dokumen	175.000.000,00	24 Dokumen	250.000.000,00	24 Dokumen	575.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000,00	24 Laporan	300.000.000,00	24 Laporan	350.000.000,00	24 Laporan	900.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MoU dan PKS yang difasilitasi	33 Angka	36 Angka	227.582.192,00	39 Angka	325.000.000,00	42 Angka	480.000.000,00	42 Angka	1.032.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	45 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	60 Dokumen	150.000.000,00	70 Dokumen	200.000.000,00	70 Dokumen	450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	47.582.192,00	10 Dokumen	50.000.000,00	15 Dokumen	100.000.000,00	15 Dokumen	197.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	25 Laporan	30 Laporan	80.000.000,00	35 Laporan	125.000.000,00	40 Laporan	180.000.000,00	40 Laporan	385.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SULAWESI SELATAN
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	100 %	100 %	3.393.000.000,00	100 %	4.793.167.534,00	100 %	5.551.018.581,00	100 %	13.737.186.115,00	BIRO HUKUM	
				Terfasilitasinya dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00		
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah	100 %	100 %	1.093.000.000,00	100 %	1.593.167.534,00	100 %	1.851.018.581,00	100 %	4.537.186.115,00	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen	40 Dokumen	518.000.000,00	40 Dokumen	818.000.000,00	40 Dokumen	1.000.000.000,00	120 Dokumen	2.336.000.000,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1200 Dokumen	1.200 Dokumen	75.000.000,00	1.200 Dokumen	75.000.000,00	1.200 Dokumen	75.000.000,00	3.600 Dokumen	225.000.000,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	20 Dokumen	50.167.534,00	20 Dokumen	50.000.000,00	60 Dokumen	150.167.534,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	500 Dokumen	500 Dokumen	450.000.000,00	500 Dokumen	650.000.000,00	500 Dokumen	726.018.581,00	1.500 Dokumen	1.826.018.581,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Masalah Hukum Yang Ditangani dan Diselesaikan	100 %	100 %	2.300.000.000,00	100 %	3.200.000.000,00	100 %	3.700.000.000,00	100 %	9.200.000.000,00	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	2 Kasus	1.500.000.000,00	2 Kasus	2.200.000.000,00	2 Kasus	2.500.000.000,00	6 Kasus	6.200.000.000,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	800.000.000,00	5 Kasus	1.000.000.000,00	5 Kasus	1.200.000.000,00	15 Kasus	3.000.000.000,00	BIRO HUKUM	SULAWESI SELATAN
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa															
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	85 %	100 %	1.503.435.635,00	100 %	2.353.435.635,00	100 %	2.353.435.635,00	%	6.210.306.905,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.06.1.01			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	persentase rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian	100 %	100 %	900.000.000,00	100 %	1.410.000.000,00	100 %	1.410.000.000,00	100 %	3.720.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	470.000.000,00	3 Dokumen	470.000.000,00	3 Dokumen	1.240.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	2 Dokumen	940.000.000,00	2 Dokumen	940.000.000,00	2 Dokumen	2.480.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.06.1.02			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	persentase rekomendasi kebijakan sumber daya alam	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	470.000.000,00	100 %	470.000.000,00	100 %	1.240.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	470.000.000,00	2 Dokumen	470.000.000,00	2 Dokumen	1.240.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.06.1.03			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD	100 %	100 %	303.435.635,00	100 %	473.435.635,00	100 %	473.435.635,00	100 %	1.250.306.905,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.06.1.03.01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	303.435.635,00	2 Dokumen	473.435.635,00	2 Dokumen	473.435.635,00	2 Dokumen	1.250.306.905,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah	87 %	100 %	1.200.000.000,00	100 %	2.050.000.000,00	100 %	2.050.000.000,00	%	5.300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.08.1.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber APBN dan APBD	100 %	100 %	900.000.000,00	100 %	1.537.500.000,00	100 %	1.537.500.000,00	100 %	3.975.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	1.325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.08.1.01.02			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	1.325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	1.325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.08.1.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD dan APBN	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	512.500.000,00	100 %	512.500.000,00	100 %	1.325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.08.1.02.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	512.500.000,00	4 Laporan	1.325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SULAWESI SELATAN
4.01.07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase kesesuaian pengadaan barang/jasa dengan rencana	- -	100 %	2.281.480.000	100 %	3.351.494.120	100 %	4.108.931.790	100 %	9.741.905.910	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang/jasa		100 %		100 %		100 %		100 %			
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	12 Laporan	670.000.000	12 Laporan	984.230.000	12 Laporan	1.206.665.980	12 Laporan	2.860.895.980	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	73.450.000	4 Laporan	90.049.700	4 Laporan	213.499.700	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Laporan	570.000.000	4 Laporan	837.330.000	4 Laporan	1.026.566.580	4 Laporan	2.433.896.580	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	73.450.000	4 Laporan	90.049.700	4 Laporan	213.499.700	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	12 Laporan	832.880.000	12 Laporan	1.223.500.720	12 Laporan	1.500.011.882	12 Laporan	3.556.392.602	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	4 Laporan	465.280.000	4 Laporan	683.496.320	4 Laporan	837.966.488	4 Laporan	1.986.742.808	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Laporan	317.600.000	4 Laporan	466.554.400	4 Laporan	571.995.694	4 Laporan	1.356.150.094	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	73.450.000	4 Laporan	90.049.700	4 Laporan	213.499.700	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	5 Dokumen	778.600.000	5 Dokumen	1.143.763.400	5 Dokumen	1.402.253.928	5 Dokumen	3.324.617.328	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-	120 Orang	300.000.000	120 Orang	440.700.000	120 Orang	540.298.200	120 Orang	1.280.998.200	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Dokumen	191.800.000	4 Dokumen	281.754.200	4 Dokumen	345.430.649	4 Dokumen	818.984.849	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Dokumen	286.800.000	4 Dokumen	421.309.200	4 Dokumen	516.525.079	4 Dokumen	1.224.634.279	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum															
4.01.02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	-	100 %	2.983.716.666	100 %	4.638.872.313	100 %	5.376.672.313	100 %	12.999.261.292	BIRO ORGANISASI	
4.01.02.1.01			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	- -	100 %	1.118.893.749	100 %	1.739.577.177	100 %	2.016.252.117	100 %	4.874.723.043	BIRO ORGANISASI	
				Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan		100 %		100 %		100 %					
4.01.02.1.01.01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	460.000.000	1 Dokumen	672.000.000	1 Dokumen	790.252.117	3 Dokumen	1.922.252.117	BIRO ORGANISASI	
4.01.02.1.01.02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	308.000.000	1 Dokumen	490.577.177	1 Dokumen	551.000.000	3 Dokumen	1.349.577.177	BIRO ORGANISASI	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-	1 Dokumen	350.893.749	1 Dokumen	577.000.000	1 Dokumen	675.000.000	3 Dokumen	1.602.893.749	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	100 %	1.864.822.917	100 %	2.899.295.136	100 %	3.360.420.196	100 %	8.124.538.249	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	2.300.000.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	639.577.177	1 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	1.739.577.177	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-	1 Laporan	218.893.749	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	316.252.117	1 Laporan	835.145.866	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	408.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.208.000.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	445.929.168	1 Dokumen	751.717.959	1 Dokumen	844.168.079	3 Dokumen	2.041.815.206	BIRO ORGANISASI	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah															
4.01.01s	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	86 Nilai	87 Nilai	149.348.746.918,00	88 Nilai	167.259.100.828,00	89 Nilai	176.761.910.579,00	89 Nilai	493.369.758.325,00				
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	100 %		100 %		100 %							
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %		100 %							
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.614.569.000,00		2.091.943.500,00		2.312.029.137,00		6.018.541.637,00				
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56 Dokumen	864.256.500,00	57 Dokumen	1.166.631.000,00	57 Dokumen	1.361.716.637,00	125 Dokumen	3.392.604.137,00		SULAWESI SELATAN		
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	87.000.000,00	5 Dokumen	112.000.000,00	5 Dokumen	112.000.000,00	7 Dokumen	311.000.000,00		SULAWESI SELATAN		
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 Dokumen	87.000.000,00	4 Dokumen	112.000.000,00	4 Dokumen	112.000.000,00	6 Dokumen	311.000.000,00		SULAWESI SELATAN		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	4 Dokumen	105.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	4 Dokumen	105.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		157 Laporan	431.312.500,00	157 Laporan	531.312.500,00	157 Laporan	556.312.500,00	459 Laporan	1.518.937.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	75.000.000	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	100.000.000	8 Laporan	275.000.000		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		832 Orang/ Bulan	74.866.362.116,00	832 Orang/ Bulan	78.001.371.741,00	832 Orang/ Bulan	80.262.859.063,00	2.496 Orang/ Bulan	233.130.592.920,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		151 Dokumen	128.786.500,00	151 Dokumen	128.786.500,00	151 Dokumen	138.786.500,00	453 Dokumen	396.359.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.402 Dokumen	368.554.000,00	2.425 Dokumen	418.554.000,00	2.434 Dokumen	428.554.000,00	7.233 Dokumen	1.215.662.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		38 Dokumen	185.765.500,00	38 Dokumen	185.765.500,00	38 Dokumen	195.765.500,00	104 Dokumen	567.296.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10 Laporan	64.970.500,00	10 Laporan	64.970.500,00	10 Laporan	84.970.500,00	30 Laporan	214.911.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		9 Dokumen	72.044.500,00	9 Dokumen	72.044.500,00	9 Dokumen	92.044.500,00	25 Dokumen	236.133.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		31 Laporan	75.000.000,00	31 Laporan	135.000.000,00	31 Laporan	170.000.000,00	33 Laporan	380.000.000,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		16 Dokumen	71.682.045,00	16 Dokumen	72.870.158,00	16 Dokumen	72.663.464,00	42 Dokumen	217.215.667,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
		4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	6 Dokumen	75.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100 Dokumen	282.221.500,00	100 Dokumen	282.221.500,00	100 Dokumen	792.221.500,00	100 Dokumen	1.356.664.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		38 Laporan	129.683.000,00	38 Laporan	129.683.000,00	38 Laporan	139.683.000,00	38 Laporan	399.049.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	116.643.500,00	1 Laporan	116.643.500,00	1 Laporan	126.643.500,00	3 Laporan	359.930.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100 Laporan	126.643.500,00	100 Laporan	126.643.500,00	100 Laporan	136.643.500,00	100 Laporan	389.930.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	119.360.500,00	1 Dokumen	119.360.500,00	1 Dokumen	382.000.000,00	1 Dokumen	620.721.000,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		48 Paket	317.221.500,00	48 Paket	317.221.500,00	48 Paket	827.221.500,00	68 Paket	1.461.664.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		21 Dokumen	212.683.000,00	21 Dokumen	326.683.000,00	21 Dokumen	336.683.000,00	63 Dokumen	876.049.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4.147 Orang	346.643.500,00	4.168 Orang	404.225.692,00	4.171 Orang	451.643.500,00	12.286 Orang	1.202.512.692,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		49 Orang	160.000.000,00	49 Orang	190.000.000,00	49 Orang	220.000.000,00	145 Orang	570.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	269.360.500,00	38 Orang	289.360.500,00	38 Orang	582.000.000,00	38 Orang	1.140.721.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan											



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18 Paket	2.618.379.000,00	18 Paket	2.627.193.000,00	18 Paket	2.739.184.964,00	42 Paket	7.984.756.964,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1.195 Paket	1.439.347.000,00	1.200 Paket	1.997.320.000,00	1.205 Paket	2.327.963.898,00	3.570 Paket	5.764.630.898,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		799 Paket	1.034.689.500,00	809 Paket	1.534.689.500,00	818 Paket	2.134.689.500,00	2.392 Paket	4.704.068.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		19.205 Paket	10.000.000,00	19.218 Paket	10.000.000,00	19.227 Paket	10.000.000,00	57.618 Paket	30.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30 Paket	664.180.500,00	30 Paket	776.080.500,00	30 Paket	976.080.500,00	36 Paket	2.416.341.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		57 Laporan	10.877.802.700,00	67 Laporan	13.986.294.700,00	72 Laporan	15.021.294.700,00	88 Laporan	39.885.392.100,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		123 Laporan	4.959.299.461,00	123 Laporan	6.353.205.199,00	123 Laporan	6.484.958.268,00	131 Laporan	17.797.462.928,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		208 Dokumen	358.313.500,00	208 Dokumen	481.213.500,00	208 Dokumen	611.213.500,00	119 Dokumen	1.450.740.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		109 Dokumen	75.000.000,00	109 Dokumen	105.000.000,00	109 Dokumen	125.000.000,00	119 Dokumen	305.000.000,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Berbasis Elektronik pada SKPD											
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
		4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		7 Unit	1.270.410.500,00	7	1.820.410.500,00	7	1.170.410.500,00	22	4.261.231.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		12.785 Unit	399.410.500,00	12.791 Unit	1.899.410.500,00	12.801 Unit	999.410.500,00	38.377 Unit	3.298.231.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		39 Unit	743.832.500,00	39 Unit	1.227.032.500,00	39 Unit	1.577.032.500,00	111 Unit	3.547.897.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		2 Unit	150.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	190.000.000,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	1.008.609.500,00	20 Unit	2.008.609.500,00	20 Unit	1.008.609.500,00	60 Unit	4.025.828.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		89 Unit	1.249.108.500,00	91 Unit	1.309.108.500,00	91 Unit	1.419.108.500,00	2.092 Unit	3.977.325.500,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan											
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		56 Laporan	344.635.500,00	56 Laporan	356.022.500,00	56 Laporan	367.658.362,00	136 Laporan	1.068.316.362,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		20 Laporan	7.634.182.704,00	20 Laporan	7.634.182.704,00	20 Laporan	8.034.182.704,00	28 Laporan	23.302.548.112,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		32 Laporan	619.210.500,00	32 Laporan	619.210.500,00	32 Laporan	719.210.500,00	66 Laporan	1.957.631.500,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34 Laporan	5.285.665.588,00	34 Laporan	5.816.256.930,00	34 Laporan	6.167.289.270,00	48 Laporan	17.269.211.788,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dipelihara											
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		61 Unit	3.310.076.500,00	61 Unit	3.428.076.500,00	61 Unit	3.546.076.500,00	2.130 Unit	10.284.229.500,00		SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23 Unit	4.309.273.452,00	23 Unit	5.682.794.252,00	23 Unit	6.123.535.193,00	27 Unit	16.115.602.897,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		61 Unit	1.326.110.500,00	62 Unit	1.301.905.500,00	63 Unit	1.770.165.170,00	67 Unit	4.398.181.170,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	175.000.000,00		
		4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		364 Unit	1.432.810.222,00	364 Unit	1.603.530.822,00	364 Unit	1.738.986.078,00	3.109 Unit	4.775.327.122,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		396 Unit	1.095.410.222,00	396 Unit	1.095.410.222,00	396 Unit	1.095.410.222,00	3.108 Unit	3.286.230.666,00		SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				7.983.413.908,00		7.983.413.908,00		8.733.413.908,00		24.700.241.724,00	BIRO UMUM	
		4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	243.601.812,00	2 Orang/Bulan	243.601.812,00	2 Orang/Bulan	293.601.812,00	6 Orang/Bulan	780.805.436,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	272.660.500,00	26 Paket	272.660.500,00	26 Paket	372.660.500,00	78 Paket	917.981.500,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	150.000.000,00	2 Orang	150.000.000,00	2 Orang	250.000.000,00	6 Orang	550.000.000,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	7.317.151.596,00	2 Orang/ Bulan	7.317.151.596,00	2 Orang/ Bulan	7.817.151.596,00	6 Orang/ Bulan	22.451.454.788,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				8.146.380.000,00		10.146.380.000,00		12.125.613.678,00		30.418.373.678,00	BIRO UMUM	
		4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	360 Paket	360 Paket	4.067.706.600,00	360 Paket	4.567.706.600,00	360 Paket	5.246.940.278,00	1.080 Paket	13.882.353.478,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	360 Paket	360 Paket	2.818.782.400,00	360 Paket	3.318.782.400,00	360 Paket	3.718.782.400,00	1.080 Paket	9.856.347.200,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
		4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	360 Paket	360 Paket	1.259.891.000,00	360 Paket	2.259.891.000,00	360 Paket	3.159.891.000,00	1.080 Paket	6.679.673.000,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.01.1.14			Fasilitasi Keprotokolan				1.425.000.000,00		1.863.000.000,00		1.863.000.000,00		5.151.000.000,00	BIRO UMUM	
4.01.01.1.14.01			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	12 Laporan	1.415.000.000,00	12 Laporan	1.415.000.000,00	36 Laporan	3.830.000.000,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
4.01.01.1.14.02			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	295.000.000,00	12 Laporan	311.000.000,00	12 Laporan	311.000.000,00	36 Laporan	917.000.000,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
4.01.01.1.14.03			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	12 Laporan	137.000.000,00	12 Laporan	137.000.000,00	36 Laporan	404.000.000,00	BIRO UMUM	SULAWESI SELATAN
Meningkatnya tata Kelola dan kualitas bahan perumusan kebijakan dalam penanganan kesejahteraan rakyat															
4.01.04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	-	99,2 %	55.837.862.678	99,3 %	65.647.862.678	99,4 %	70.427.862.678	99,4 %	191.913.588.035	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran		46,3 %		46,35 %	46,4 %	46,4 %					
4.01.04.1.01			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan Mental dan Spritual yang dimanfaatkan	-	100 %	48.337.862.678	100 %	54.647.862.678	100 %	57.597.862.678	100 %	160.583.588.035	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	-	4 Unit	3.000.000.000	4 Unit	5.000.000.000	4 Unit	5.000.000.000	4 Unit	13.000.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN
		4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	-	200 Lembaga	45.337.862.678	250 Lembaga	49.647.862.678	280 Lembaga	52.597.862.678	280 Lembaga	147.583.588.035	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	-	100 %	7.200.000.000	100 %	10.400.000.000	100 %	12.080.000.000	100 %	29.680.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	7.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	11.580.000.000	1 Dokumen	28.580.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	-	100 %	300.000.000	100 %	600.000.000	100 %	750.000.000	100 %	1.650.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULAWESI SELATAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
4.01.04.1.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dengan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Pada bagian ini yang menjadi titik berat adalah indikator kinerja unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Adapun indikator ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan ukuran atas keberhasilan yang diselenggarakan oleh masing- masing biro. Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Sekretariat Daerah yang masuk dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 Mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD maka menetapkan 3 sasaran dengan indikator sasaran seperti pada tabel 7.2.



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	1. Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Skor	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Penilaian Kemendagri	Biro Pemerintahan
		2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Skor	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Laporan Hasil Evaluasi dari Kemendagri	Biro Pemerintahan
		3. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target kerjasama}} \times 100\%$	MoU & Perjanjian Kerjasama	Biro Pemerintahan
		4. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Produk Hukum ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum yang}} \times 100\%$	Perda/Pergub/ Kepgub	Biro Hukum
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	5. Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Harga barang Sekarang} - \text{Harga barang Tahun lalu}}{\text{Harga Barang Sekarang}} \times 100\%$	Bank Indonesia	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		6. Persentase Kebijakan Kawasan Strategis Provinsi yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah kebijakan Kawasan Strategis Provinsi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Target Kebijakan Kawasan Strategis Provinsi}} \times 100\%$	Dokumen Kawasan Strategis Provinsi	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		7. Persentase Capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang selesai pada Tahun } n}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sulsel	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		8. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah paket RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai Prosedur}}{\text{Jumlah paket yang akan ditender dalam RUP}} \times 100\%$	Data SIRUP	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		9. Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	Perhitungan level sesuai dengan Hasil Penilaian Per Komponen penilaian LKPP	Penilaian LKPP	Biro Pengadaan Barang/Jasa



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi dan Umum	10. Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	Skoring Perhitungan Bobot Penilaian Sesuai Komponen Penilaian pada Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan (PermenpanRB 20/2018)	Biro Organisasi
		11. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	= 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03 Keterangan: - Nilai Indeks Formulir-02/03 = $\sum(\text{nilai per aspek F-02/03} \times \text{Bobot Aspek F-02/03})$ - Nilai per aspek F-02/03 = $\sum \text{nilai per indikator F-02/03}$ - Nilai per Indikator = $\text{Nilai F02/03} \times \text{bobot Indikator}$ - F02 = Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif. - F03 = Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	Indeks Pelayanan Publik (PermenpanRB 4/2023 dan Pedoman MenpanRB 5/2023)	Biro Organisasi



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		12. Nilai Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	Penilaian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara ke penyelenggara layanan, wawancara ke masyarakat, observasi ketampakan fisik (<i>tangible</i>) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan	UU Nomor 37 Tahun 2008 dan UU Nomor 25 Tahun 2009	Biro Organisasi
		13 Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	Bobot Komponen Pelaporan pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan	Rekapitulasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Biro Organisasi
		14 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persen	$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah Kegiatan Utama RB General yang diimplementasikan $A = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Utama RB General yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan RB General}} \times 100\%$ Jumlah Kegiatan Utama RB Tematik yang diimplementasikan $B = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Utama RB Tematik yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan RB Tematik}} \times 100\%$	Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		15. Indeks Kepuasan Layanan Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks	Perhitungan Indeks sesuai dengan Komponen penilaian Survei yang dilaksanakan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Biro Umum
		16. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Persentase	Perhitungan Indeks sesuai dengan Komponen penilaian Survei yang dilaksanakan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Biro Umum
4	Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	17. Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah data/informasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Data/Informasi bidang kesra yang tersedia}} \times 100\%$		Biro Kesejahteraan Rakyat



Tabel 7.2 (T-C.28) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2	Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penyelesaian Batas Wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Reformasi Hukum	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
6	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
10	Indeks tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72,40%	73%73	74%	76%	78%	78%
11	Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	10,89	11,01	12	13	14	14
12	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	N/A	83%	85%	87%	89%	89%
13	Nilai Evaluasi Kelembagaan	74,8	61	63	65	70	70
14	Indeks Pelayanan Publik	4,34	4,34	4,38	4,40	4,51	4,51
15	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik	61,94	73,38	78	79	80	80
16	Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)
17	Indeks pelayanan Keuangan lingkup Sekretariat Daerah yang tepat waktu	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)	95 (sangat puas)
19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	91 (AA)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	84 (A)
20	% capaian kinerja Program Perangkat Daerah	98%	99%	100%	100%	100%	100%
21	% Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Indikator Kinerja harus dapat terukur (SMART) dan serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah selesainya pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPD. Sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya disajikan dalam tabel 7.2 (T.C. 28)



Tabel 7.3 *Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Tujuan dan Sasaran*

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	86	87	88	89	89
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	%	100	100	100	100	100
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	10	10
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	2	3	3	3	3
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5	7	9	9
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	150	200	250	250
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	150	200	250	250
	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Laporan	63	70	76	83	83



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	11	12	13	13
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	55	60	65	65
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2	2	3	3
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	6	7	8	9	9
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	7	8	9	9
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Laporan	23	24	25	26	26
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	1
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	6	6
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	16	17	18	18
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
	Cakupan Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Dokumen	10	11	12	13	13
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	3	3	3	3	3



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	5	6	7	8	8
	Jumah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	84	88	92	96	96
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	36	40	44	48	48
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	24	24	24	24	24
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	24	24	24	24	24
	Jumlah MoU dan PKS yang difasilitasi	Angka	33	36	39	42	42
	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	45	50	60	70	70
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	5	5	10	15	15
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	25	30	35	40	40
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	-	99,2	99,2	99,3	99,3
	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai		95,5	96	98	98
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%		100	100	100	100
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	2	3	3	3
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	2	2	2	2



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	5	5	5	5
	Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	12	12	12	12
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	5	5	5	5
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	18	18	18	18
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1	1	1	1
	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	2	2	2	2
	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	44	45	45	45
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	5	5	5	5
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	15	15	15	15
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	15	15	15	15
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	1	1	1



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	4	4	4	4
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	4	4	4	4
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	30	40	45	45
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	12	12	12	12
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	1	1	1	1
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	3	3	3	3
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	3	3	3	3
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		-	1	-	-	-
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	6	6	6
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	12	12	12
	Persentase Barang Milik Yang Dipelihara	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	9	9	9	9
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	10	10	10	10
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	1	1	1
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	2	2	2
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	-	99,2	99,3	99,4	99,4



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%		46,3	46,35	46,4	46,4
	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan Mental dan Spritual yang dimanfaatkan	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	-	4	4	4	4
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	-	200	250	280	280
	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	-	1	1	1	1
	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	-	1	1	1	1
BIRO HUKUM							
	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik,%Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	100	100	100	100	100
	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	2	2	2
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	1	1
	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	Dokumen	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2	2	2	2
	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah Rata-rata nilai perilaku pegawai	%	98	98	98	98	98
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5	5	5	5
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		80	80	80	80
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	2	2	2
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		50	50	50	50
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		4	4	4	4
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	1	1
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		65	111	141	2.026
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1	1
	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		9	9	9	2.026
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	1	2.026



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		34	34	34	2.026
	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	40	40	40	40	120
	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	1200	1.200	1.200	1.200	3.600
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	20	20	20	20	60
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	500	500	500	500	1.500
	Persentase Masalah Hukum Yang Ditangani dan Diselesaikan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	2	2	2	2	6
	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	5	5	5	5	15
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	%	90	100	100	100	100
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	%	100.000	100	100	100	100
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100.000	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	8	8
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2
	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Unit	2	2	2	2	2
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	13	13	13	13	13
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	10	10	10
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	3
	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	85	100	100	100	
	persentase rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	2	3	3
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	2	2	2	2
	persentase rekomendasi kebijakan sumber daya alam	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	2	2	2	2
	Persentase rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	2	2	2	2	2
	Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah	%	87	100	100	100	
	Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber APBN dan APBD	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD dan APBN	%	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	4	4	4
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	-	100	100	100	100
	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai		100	100	100	100
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	4	4	4	4
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	4	4	4	4
	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Unit	-	3	3	3	3
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	3	3	3	3
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	8	8	8	8
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	8	8	8	8
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	8	8	8	8
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	-	3	3	3	3
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	15	15	15	15
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	30	30	30	30
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	1	1	1
	Persentase kesesuaian pengadaan barang/jasa dengan rencana	%	-	100	100	100	100
	Persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang/jasa	%		100	100	100	100
	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	4	4	4	4



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	-	4	4	4	4
	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	-	5	5	5	5
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	-	120	120	120	120
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	-	4	4	4	4
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	-	4	4	4	4
BIRO ORGANISASI							
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	%	-	83	84	85	85
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	%		98	99	100	100
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%		0	0	-	-
	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	2	2	2	6
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	3



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	1	1	1	3
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	1	1	1	3
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	1	1	3
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	1	1	1	3
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	2	2	2	6
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	38	38	38	38
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	1	1	1	3
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	1	1	1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	2	2	2	2
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	5	5	5	5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	1	1	1	1
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	2	3	4	9
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	1	1	1	3
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	1	1	3



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	1	1	1	1
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	1	1	1	1
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	100	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	6	6	6	6
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	1	1	1	1
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	1	1	1
	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	-	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	-	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%		100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	%		100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	-	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	-	1	1	1	3



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
BIRO UMUM							
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	93	93	94	95	95
	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai	93	93	94	95	95
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	90	90	92	94	94
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	32	32	32	96
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	150	150	150	450
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	-	832	832	832	2496
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	832	832	Orang/	2496
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	151	151	151	453
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	2388	2.411	2420	7219
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	32	32	32	96
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	9	9	9	27
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	8	8	8	24
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	13	13	13	39
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1778	1793	1811	5.382
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	16	16	16	48
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	16	16	16	48
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	12	12	12	12
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	12	12	12	36
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	482	501	513	1.496
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	482	501	513	1.496
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	10	10	10	30
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	20	20	20	60



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	4.047	4.068	4.071	12.186
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	48	48	48	144
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	36	36	36	36
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	12	12	12	36
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	1.180	1.185	1.190	3.555
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	782	792	801	2.375
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	19.189	19.202	19.211	57.602
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	3	3	3	9
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	8	8	8	24
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	4	4	12
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	2	2	6
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	4	4	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12.785	12.791	12.801	38.377
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	36	36	36	108
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	20	20	20	60
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	20	20	20	60
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	20	20	20	60
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	40	40	40	120
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	4	4	4	12
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	17	17	17	51
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	7	7	7	21
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	-	2	2	2	6



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	26	26	26	78
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	-	2	2	2	6
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	-	2	2	2	6
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	360	360	360	1.080
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	360	360	360	1.080
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	-	360	360	360	1.080
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	-	12	12	12	36
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	-	12	12	12	36
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	-	12	12	12	36



BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya.
2. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
3. Sasaran strategis Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikoordinasikan oleh para Eselon II sebagai penanggung jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
5. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik terintegrasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.